

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkannya perlu disusun suatu rancangan pembangunan yang terstruktur, terukur, partisipatif, dan akuntabel agar tercipta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan baik dari segi perencanaan maupun implementasinya.

Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010. Sedangkan periodisasi rencana pembangunan jangka menengahnya terdiri dari kurun waktu tahun 2006 – 2010, tahun 2011 – 2015, tahun 2016 – 2020 dan tahun 2021 – 2025. Dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut selain sebagai dokumen perencanaan yang bersifat hirarki dengan RPJPD Kota Blitar juga sebagai implementasi dari kontrak sosial dan politik dari walikota dan wakil walikota terpilih pada periode yang bersangkutan.

Dokumen RPJMD Kota Blitar tahun 2011 – 2015 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1) **Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah

proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para kandidat kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu juga sebagai proses politik di DPRD ketika terjadi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- 2) **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu. Proses teknokratik dilakukan oleh Bappeda Kota Blitar selaku lembaga yang berfungsi sebagai penyusun rencana pembangunan daerah, yang dalam prosesnya mendapat masukan dari SKPD se Kota Blitar dalam bentuk rancangan (draft) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
- 3) **Partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Proses ini melalui penjaringan aspirasi, musrenbang RPJMD, maupun konsultasi publik kepada stakeholders.
- 4) **Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up)**, Proses top down dan bottom up dilakukan sebagai upaya terpadu untuk mensinergikan dan mengintegrasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Pendekatan ini juga untuk menyelaraskan antara perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan kota Blitar, dengan demikian RPJMD Kota Blitar memiliki

keterkaitan dan bersinergi dengan program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena RPJMD sebagai sebuah hasil dari proses yang panjang, dan merupakan produk bersama antara Eksekutif dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, maka RPJMD harus menjadi pedoman bagi seluruh komponen pembangunan Kota Blitar dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kota Blitar.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

1.2.1. Tujuan RPJMD

RPJMD disusun sebagai rencana pembangunan 5 tahunan yang bertujuan untuk :

- 1) Kebijakan pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2011-2015;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan
- 3) Dasar penyusunan Renstra SKPD tahun 2011-2015;
- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota;
- 5) Dasar dan pedoman bagi semua pihak yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan Kota Blitar.

1.3. Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 dalam rangka sinkronisasi, intergrasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1954);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- u. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
- x. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2005 Nomor 2 / D);
- y. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G);
- z. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan sekretariat dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 1 / D);
- aa. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 2/D);

- bb. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 3 / D);
- cc. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 1/A);
- dd. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 1/A);
- ee. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
- ff. Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

1.4. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mengamanatkan bahwa RPJMD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga dalam penyusunannya, RPJMD berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti RPJPD dan RTRW Kota Blitar serta memperhatikan RPJP dan RPJM Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Oleh karenanya, RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 yang merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, disamping substansinya harus mengacu pada RPJP Kota Blitar tahun 2005 – 2025

harus pula diarahkan pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang (RTRW Kota Blitar tahun 2008 – 2028). Sehingga RPJMD Kota Blitar dapat bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN**
- II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
- IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
- V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
- VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
- VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
- IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
- X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Untuk mendapatkan suatu perencanaan yang berkualitas maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Implementasinya, hal tersebut diatur pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 29 yang menyebutkan bahwa Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 ini disajikan data dan informasi 5 (lima) tahun sebelumnya (2005-2009) sebagai dasar penentuan capaian untuk lima tahun kedepan (2011-2015). Berikut ini diuraikan gambaran kondisi umum Kota Blitar yang merupakan kondisi awal perencanaan dokumen RPJMD Kota Blitar serta memuat informasi dan potensi sebagai bahan penyusunan analisis dan isu-isu daerah, sekaligus bahan analisis, prediksi dan titik awal dalam perencanaan lima tahun kedepan.

2.1. Kondisi Geografis

Secara geografis posisi wilayah Kota Blitar berada pada sisi selatan Provinsi Jawa Timur, yang terletak pada koordinat 112° 114' - 112° 28' Bujur Timur dan 8° 2' - 8° 10' Lintang Selatan. Antara pusat pemerintahan

kota dengan pusat pemerintahan provinsi yang beribukota di Surabaya berjarak ± 160 km, dengan temperatur udara rata-rata berkisar pada 29°C dan tipe iklim C- 3. .

Kontur tanah wilayah Kota Blitar termasuk daerah yang memiliki tingkat kemiringan cukup tinggi sebagai pengaruh dari posisinya yang berada pada lereng Gunung Kelud. Dari posisi tersebut ketinggian tanah di Kota Blitar terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian utara, tengah dan selatan dimana bagian utara mempunyai ketinggian ± 245 meter dari permukaan air laut, bagian tengah ± 190 meter dan bagian selatan ± 140 meter dari permukaan air laut, sehingga secara keseluruhan tingkat ketinggian rata-rata adalah 157 meter dari permukaan air laut. Struktur tanah di wilayah Kota Blitar terdiri dari jenis tanah *Litosol* dan *Regusol* hal tersebut diakibatkan karena sisa material letusan Gunung Kelud. Sungai yang mengalir di Kota Blitar adalah sungai lahar dengan panjang $\pm 7,84$ km yang hulunya berada di Gunung Kelud dan bermuara di sungai Brantas. Posisi yang tidak jauh dari Gunung Kelud tersebut berpengaruh pada curah hujan dan hari hujan pada tahun 2009 puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan mencapai 15 hari dan curah hujan mencapai 19,03 mm per hari. Sementara antara bulan Juni sampai dengan oktober sudah memasuki bulan kemarau dengan puncaknya pada bulan Agustus dimana pada bulan tersebut tidak ada hari hujan sama sekali.

Wilayah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dengan 20 kelurahan. Selanjutnya pada

tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 dijadikan 21 Kelurahan hasil dari pemecahan Kelurahan Pakunden yang menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tanjungsari. Adapun perincian luas wilayah masing-masing Kelurahan dan kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar

Kecamatan		Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
I.	Sukorejo		9,9246
		1. Tlumpu	1,0153
		2. Karang Sari	0,8824
		3. Turi	0,5086
		4. Blitar	1,33205
		5. Sukorejo	1,4662
		6. Pakunden	2,262
		7. Tanjungsari	2,45805
II.	Kepanjenkidul		10,50234
		1. Kepanjenkidul	0,86703
		2. Kepanjenlor	0,61328
		3. Kauman	0,68033
		4. Bendo	1,5185
		5. Tanggung	2,23
		6. Sentul	2,683
		7. Ngadirejo	1,9102
III.	Sananwetan		12,15155
		1. Rembang	0,84425
		2. Klampok	1,5307
		3. Plosokerep	1,2481
		4. Karangtengah	1,7954
		5. Sananwetan	2,1279
		6. Bendogerit	1,9552
		7. Gedog	2,65
Kota Blitar			32,57849

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, BPS 2010

Sedangkan secara administratif, wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum;

- Sebelah Selatan : Berbatasan Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro ;
- Sebelah Barat : Berbatasan Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok ;
- Sebelah Timur : Berbatasan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum

2.2. Kondisi Demografis

2.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Blitar pada akhir tahun 2005 berjumlah 128.255 jiwa, terdiri atas 63.369 laki-laki dan 64.886 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk Kota Blitar pada akhir tahun 2009 mencapai 139.471 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 69.566 jiwa dan perempuan sebanyak 69.905 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan dengan komposisi jumlah di setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Kota Blitar Akhir Tahun 2009

No	Kecamatan	Berdasarkan Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki – laki	Perempuan		
1.	Sukorejo	23.799	23.588	47.387	100,89
2.	Kepanjenkidul	19.888	20.109	39.997	98,90
3.	Sananwetan	25.879	26.208	52.087	98,74
Jumlah		69.566	69.905	139.471	99,52

Sumber Data : BPS Kota Blitar 2010

Dilihat pada tabel diatas terlihat bahwa rasio jenis kelamin di Kota Blitar sebesar 99,52 artinya bahwa pada akhir tahun 2009 rata-rata setiap 100 penduduk perempuan ada 99 laki-laki.

Apabila dilihat dari sisi komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur saat ini, secara umum sangat mendukung dalam percepatan pencapaian pembangunan karena 68,48 % adalah penduduk usia produktif. Adapun untuk mengetahui Jumlah penduduk menurut Kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kota Blitar
Tahun 2005-2009

No	TAHUN	KELOMPOK USIA						JUMLAH TOTAL
		0-14 Tahun		15-64 Tahun		>65 Tahun		
		Jumlah (Jiwa)	Persen (%)	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)	
1.	2005	31.533	24,61	87.812	68,47	8.880	6,92	128.225
2.	2006	31.709	24,59	88.325	68,47	8.956	6,94	128.990
3.	2007	32.491	24,59	90.454	68,47	9.162	6,94	132.107
4.	2008	32.790	24,59	91.271	68,47	9.245	6,94	133.306
5.	2009	34.295	24,59	95.496	68,48	9.666	6,93	139.457

Sumber data: BPS Kota Blitar tahun 2010

Dari data tersebut diatas apabila di hitung Rasio ketergantungannya maka pada tahun 2009 Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda sebesar 35,91 %, Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Tua sebesar 10,12 % dan Rasio ketergantungan total adalah sebesar 46,03 %, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 46,03 % ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 35,91 %, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10,12 %. Dari data ini terlihat bahwa pada tahun 2009 penduduk usia kerja di Kota Blitar masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.2.2 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Tingkat pertumbuhan Penduduk Kota Blitar dapat dikategorikan sebagai Kota yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup pesat. Hal ini lebih disebabkan oleh besarnya arus urbanisasi di Kota Blitar. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kota Blitar Tahun 2005-2009

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	2005	128.255	1,45	32,57	3.937,83
2.	2006	128.990	0,56	32,57	3.960,39
3.	2007	132.107	2,36	32,57	4.056,09
4.	2008	133.306	0,89	32,57	4.092,91
5.	2009	139.457 *)	4,61	32,57	4.281,76

Sumber : BPS Kota Blitar Tahun 2010

*) Hasil Pencocokan dan penelitian Dispenduk Capil 2009

Dengan melihat data penduduk di atas, bahwa antara tahun 2005 sampai dengan akhir 2009 ada penambahan jumlah penduduk Kota Blitar sebanyak 11.216 jiwa. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kota Blitar adalah 4.281,14 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Sukorejo yang mencapai 4.784,15 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah di wilayah kecamatan Kepanjenkidul hanya mencapai jumlah 3.808,51 jiwa/km².

2.2.3 Keluarga Berencana

Salah satu usaha dalam penanganan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana yang sudah dilaksanakan sejak beberapa dasawarsa. Namun demikian program tersebut pada akhir-akhir tahun ini kurang mendapatkan perhatian

dalam pelaksanaan program pembangunan di beberapa daerah, sehingga berakibat pada laju pertumbuhan penduduk yang relatif tidak terkendali.

Gambaran pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kota Blitar tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Pasangan Usia Subur dan Pencapaian KB Aktif
Kota Blitar Tahun 2005-2009

No	Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (Jiwa)	Pencapaian Peserta KB Aktif	Prosentase Peserta KB Aktif Thd PUS
1.	2005	21.362	15.942	74,63
2.	2006	22.648	16.785	74,11
3.	2007	22.585	16.510	73,10
4.	2008	22.985	17.129	74,52
5.	2009	22.191	16,143	72,77

Sumber : Bapemas dan KB Tahun 2010

Sesuai tabel diatas tingkat pencapaian Peserta KB aktif sudah cukup baik, namun ada kecenderungan penurunan prosentase pencapaiannya.

2.2.4 Ketenagakerjaan

Faktor ketenagakerjaan adalah faktor penting dalam upaya untuk meningkatkan investasi di daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gambaran umum data ketenagakerjaan di Kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Data Ketenagakerjaan Kota Blitar tahun 2006-2009

No	Uraian	TAHUN			
		2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Penduduk	128.990	132.107	133.306	139.457
1.	Angkatan Kerja	50.119	83.851	85.949	90.508
2.	Pencari kerja	6.969	1.348	3.124	1.756
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,09%	8,24 %	6,97%	8,47%

Sumber Data : Dinas Sosnaker, 2010

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa seiring dengan peningkatan jumlah penduduk jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan menjadi 64,90% dari total jumlah penduduk. Angkatan kerja tersebut didominasi oleh usia produktif yaitu pada kisaran 15 – 55 tahun. Jumlah angkatan kerja ini terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja, tidak bekerja, dan sedang menempuh pendidikan formal. Sedangkan jumlah pencari kerja penduduk Kota Blitar yang tercatat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami perubahan secara fluktuatif, namun rata-rata mengalami penurunan.

Disisi lain apabila kita melihat data upah yang ditetapkan di wilayah Kota Blitar sepanjang tahun 2005 – 2009 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kondisi perekonomian di Kota Blitar, data kenaikan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7

Kondisi UMK Kota Blitar Tahun 2006 - 2009

No.	Tahun	Jumlah	Jumlah Kenaikan dengan Tahun sebelumnya
1	2006	Rp. 390.000,00	-
2	2007	Rp. 448.500,00	Rp. 58.500,00
3	2008	Rp. 506.500,00	Rp. 58.000,00
4	2009	Rp. 572.500,00	Rp. 66.000,00

Sumber data : Dinas Sosnaker Akhir Tahun 2009

Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa setiap tahun terdapat kenaikan upah minimum kota rata-rata sebesar Rp. 60.833,33, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator yang dipakai dalam pengukuran keberhasilan pembangunan adalah Angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang tersusun berdasarkan tiga indikator, yaitu : 1). indeks kesehatan yang diukur dengan indeks harapan hidup pada saat lahir; 2). Indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk usia 15 tahun keatas dengan bobot dua per tiga dan rata-rata lama sekolah dengan bobot sepertiga; 3). Indeks *Purchasing Power Parity* (PPP) yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Indikator pertama mengukur “umur panjang dan sehat”, indikator kedua untuk mengukur “pengetahuan dan ketrampilan”, sedangkan indikator terakhir mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas.

Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat dan terjadi peningkatan pengetahuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas SDM. Pencapaian dua hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan kehidupan yang layak. Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 tingkat pencapaian IPM Kota Blitar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8.
Komponen IPM Kota Blitar tahun 2005-2009

Komponen IPM	2005	2006	2007	2008	2009
Indeks Kesehatan	76.67	77.08	77.53	78.50	77.85
Indeks pendidikan	84.76	84.73	85.26	86.59	86.63
Indeks PPP	58.13	58.37	60.75	59.82	66.88
IPM	73.19	73.40	74.51	74.97	77,12

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2010

2.3. Kondisi Pendidikan

Dalam proses pembangunan pendidikan di Kota Blitar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan dengan berbagai cara diantaranya peningkatan jangkauan masyarakat dalam mengakses pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) sampai dengan SLTA, peningkatan kemampuan siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kinerja lembaga pendidikan guna pengelolaan pendidikan yang baik.

Pada sisi lain upaya tersebut tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak diikuti dengan kebijakan penganggarannya. Sesuai dengan amanat UUD 1945 yang telah diamandemen dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 % dari total APBN atau APBD. Prosentase anggaran pendidikan terhadap APBD Kota Blitar dari Tahun 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9.
Prosentase Anggaran Pendidikan Terhadap APBD Kota Blitar
Tahun 2006 - 2010

No	Tahun	Prosentase Anggaran
1	2006	26,59
2	2007	27,52
3	2008	27,84
4	2009	30,93
5	2010	29,70

Sumber Data : Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2010

Gambaran kondisi pendidikan di Kota Blitar dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

2.3.1 Sarana dan Potensi Pendidikan Formal dan Non Formal

Sampai akhir tahun 2009 jumlah sarana pendidikan formal di Kota Blitar sebanyak 212 buah, jumlah tersebut secara keseluruhan tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, hanya komposisinya saja yang sedikit mengalami perubahan dengan perincian seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10.
Perkembangan Lembaga Pendidikan Formal Kota Blitar
Tahun 2005 - 2009

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Lembaga Sekolah				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	TK	70	79	80	81	82
2.	SD/MI	72	79	72	73	72
3.	SMP/MTs	22	24	27	26	26
4.	SMA/SMK/MA	27	27	26	27	24
5.	PT	7	7	8	8	8
Jumlah		207	216	213	212	212

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2010

Dari jumlah lembaga pendidikan formal yang ada tersebut dapat menampung murid/mahasiswa baik dari Kota Blitar maupun dari wilayah di luar Kota Blitar dengan perkembangan data selama kurun waktu 2005-2009 sebagai berikut :

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Murid / Mahasiswa di Kota Blitar
Tahun 2005-2009

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid/Mahasiswa				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	TK	4.158	4.532	5.119	5.238	5.360
2.	SD/MI	16.036	18.724	15.629	16.120	16.933
3.	SMP/MTs	10.741	9.675	10.721	10.616	11.136
4.	SMA/SMK/MA	16705	15.016	15.477	15.488	15.634
5.	PT	2.050	2.553	2.988	3.052	4.327
Jumlah		49.690	50.500	49.934	50.514	53.390

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2010

Dari data tersebut diatas menggambarkan bahwa ada peningkatan jumlah siswa yang dapat ditampung di Lembaga Pendidikan di Kota Blitar, pada tahun 2005 sebesar 49.690 siswa

meningkat menjadi 53.390 siswa atau bertambah sebesar 7,4 %. Namun demikian karena Lembaga Pendidikan di Kota Blitar berada di tengah Kota maka dari jumlah tersebut sebagian berasal dari wilayah Kabupaten Blitar, khususnya pada jenjang pendidikan SLTP keatas.

Salah satu yang berpengaruh dalam proses peningkatan kualitas pendidikan adalah mutu dan jumlah tenaga pendidik, mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah. Jumlah tenaga pendidik mulai tahun 2005 sampai dengan 2009 perkembangannya mengalami fluktuasi, kondisi demikian terjadi karena adanya tenaga pendidik yang masuk batas usia pensiun dan selanjutnya digantikan dengan tenaga baru yang berasal dari perekrutan melalui pengadaan CPNS baru. Untuk mengetahui potensi tenaga pendidik dari segi jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Perkembangan Guru/Dosen di Kota Blitar
Tahun 2005-2009

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru/Dosen				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	TK	298	314	330	441	373
2.	SD/MI	940	1.180	938	986	1.000
3.	SMP/MTs	829	803	806	799	824
4.	SMA/SMK/MA	1.119	1.009	1.055	1.075	1.117
5.	PT	254	285	246	246	312
Jumlah		3.440	3.591	3.375	3.547	3.626

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2010

Disamping kualitas tenaga pendidik, rasio jumlah guru dan murid juga berpengaruh pada kualitas pendidikan. Kondisi pada akhir tahun 2009 rasio terkecil antara guru dan murid pada jenjang SLTP adalah 1:13,51 dan yang terbesar adalah 1:16,93 pada jenjang SD.

Untuk mengetahui perkembangan rasio jumlah guru dan murid selama tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.13
Perkembangan Rasio Guru dan Murid Kota Blitar
Tahun 2005-2009

NO	JENJANG PENDIDIKAN	RASIO GURU DAN MURID				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	TK	1 : 13,95	1 : 14,43	1 : 15,51	1 : 11,88	1 : 14,37
2.	SD	1 : 17,06	1 : 15,87	1 : 16,66	1 : 16,35	1 : 16,93
3.	SMP	1 : 12,96	1 : 12,05	1 : 13,30	1 : 13,29	1 : 13,51
4.	SMA/SMK	1 : 14,93	1 : 14,88	1 : 14,67	1 : 14,41	1 : 14,00

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2010 yang diolah

Sedangkan kondisi pendidikan non formal yang ada di Kota Blitar selama kurun waktu 2005-2009 juga mengalami perkembangan baik dari jenis maupun jumlahnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Perkembangan Pendidikan Non Formal di Kota Blitar
Tahun 2005 – 2009

No	Jenis Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Kejar Paket A	14	3	4	3	6
2.	Kejar paket B	0	0	5	5	6
3.	Kejar Paket C	0	0	5	5	6
4.	Kursus Tata Kencantikan	0	3	2	4	3
5.	Kursus Menjahit	8	9	6	11	11
6.	Kursus Bahasa Inggris	8	9	6	6	7
7.	Kursus Komputer	10	14	11	11	14
8.	Bimbingan Belajar	10	14	9	10	11
9.	Kursus Keterampilan lain	10	15	7	4	5
Jumlah		60	67	55	59	69

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2010 yang diolah

2.3.2 Pembangunan Pendidikan

Untuk mengetahui sejauh mana hasil dari program yang telah dilaksanakan maka salah satunya adalah dengan mengetahui

perkembangan rata-rata lulusan dari tahun 2005 sampai dengan 2009 mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, adapun perkembangan rata-rata prosentase lulusan ujian nasional pada jenjang pendidikan formal mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Rata-rata Prosentase Lulusan Ujian Nasional
Tahun 2005-2009

No	Jenis Pendidikan	Prosentase Kelulusan				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI	99,80	100	100	100	100
2	SMP/MTs	90,75	93,12	90,17	88,70	92,00
3	SMA/SMK/MA	91,85	89,99	91,96	86,73	91,71

Sumber Data : Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2010

Indikator lain untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Kota Blitar dapat dilihat dari perkembangan perolehan Rata-rata Nilai Ujian Nasional dari tahun 2005 sampai dengan 2009 sebagaimana tertera pada Tabel 2.14 berikut :

Tabel 2.16
Rata-rata Nilai Ujian Nasional
Tahun 2005-2009

No	Jenis Pendidikan	Nilai Rata-Rata				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	SD/MI				7,17	7,65
2	SMP/MTs	6,80	6,45	6,65	6,58	7,19
3	SMA/SMK/MA	6,30	6,46	6,62	6,90	7,30

Sumber Data : Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai ujian nasional pada SD dari tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan, demikian juga yang terjadi pada tingkat SMP dan SMA/SMK/MA. Pada tingkat SMP perolehan Rata-rata Nilai Ujian Nasional berjalan fluktuatif, terendah pada tahun 2006 dan tertinggi pada tahun 2009.

Pada tingkat SMA/SMK/MA Rata-rata Nilai Ujian Nasional senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tertinggi pada tahun 2009 dengan nilai rata-rata 7,30.

Hasil dari upaya yang telah dilaksanakan dengan didukung sepenuhnya oleh partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2007- 2009. Data perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 17
APK dan APM Kota Blitar

NO	JENJANG PENDIDIKAN	APK			APM		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	SD/MI	126,86 %	151,86 %	131,19%	116,10 %	140,02%	119,27%
2.	SMP/MTs/SMPLB	140,31 %	106,89%	145,44%	114,96 %	83,40%	114,85%
3.	SMA/SMK/MA	156,03 %	140,22%	153,84%	105,60 %	104,65%	125,08%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar

Dari data tabel tingkat pencapaian APK maupun APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2008 terjadi penurunan yang sangat drastis baik dari sisi APK maupun APM, tetapi pada tahun 2009 terjadi kenaikan kembali. Namun untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2009 APK maupun APM mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut terjadi disebabkan karena adanya kecenderungan masyarakat yang sudah menyekolahkan anaknya pada usia lebih awal sehingga ketika memasuki jenjang SD maupun SMP banyak yang umurnya masih dibawah 7 tahun untuk SD/MI dan 13 tahun untuk SMP. Namun perlu menjadi catatan bahwa angka-angka tersebut dipengaruhi oleh murid yang berasal dari luar Kota Blitar khususnya pada jenjang SMP dan SMA.

Indikator lain untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sampai dengan rata-rata pendidikan menengah, dapat dilihat dari data rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun. Secara rinci data tentang angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Blitar dari tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah Penduduk
Kota Blitar Tahun 2005-2009

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009
1	Angka Melek Huruf	96,30 %	96,47%	97,10 %	97,30 %	98,00 %
2	Rata-rata Lama Sekolah	9,02	9,26	9,46	9,57	9,58

Sumber data : BPS Kota Blitar Tahun 2010

Dari tabel 2.16 dapat diketahui bahwa angka melek huruf meningkat tiap tahun dan kondisi pada akhir tahun 2009 angka melek huruf sebesar 98,00%.

2.4. Kondisi Kesehatan

2.4.1 Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar

Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pembangunan kesehatan diantaranya dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta.

Untuk mengetahui perkembangan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Tahun 2005-2009

No	Jenis Sarpras	Jumlah				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Rumah Sakit	4	4	5	5	5
2	Rumah Sakit Bersalin	2	2	2	2	2
3	Puskesmas	3	3	3	3	3
4	Puskesmas pembantu	15	15	16	16	16
5	Klinik KB	2	4	4	4	4
6	Posyandu	156	157	158	159	159
7	Balai Pengobatan	2	4	4	4	4
8	Laboratorium Klinik	4	4	4	4	5
9	Apotik	22	24	30	30	28
10	Toko Obat	2	2	2	2	1
11	Optik	7	7	7	7	10
JUMLAH		217	226	235	236	237

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2010

2.4.2 Tenaga Kesehatan

Faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan adalah ketersediaan sumberdaya kesehatan yang memadai baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Untuk mengetahui perkembangan tenaga kesehatan di Kota Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Tenaga Kesehatan
Tahun 2005-2009

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Dokter					
	- Umum	76	56	57	57	66
	- Gigi	35	11	11	11	14
	- Spesialis	22	24	29	29	32
2	Perawat	407	191	328	328	481
3	Bidan	58	44	67	67	91
4	Ahli Gizi/Nutrisionis	21	17	16	25	38
5	Paramedis Lainnya	298	95	95	95	200
JUMLAH		917	438	603	612	922

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2010

2.4.3 Hasil Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Blitar pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, program

pembangunan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagian tugas Pemerintah dalam pemeliharaan kesehatan adalah dengan penyediaan sumberdaya Kesehatan dan sarana prasarana kesehatan dasar. Untuk melihat perkembangan ketersediaan sumberdaya kesehatan adalah dengan melihat rasio perbandingan tenaga kesehatan per-100.000 penduduk. Data rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Dokter					
	- Umum	59,26	43,41	43,15	42,76	47,33
	- Gigi	27,29	8,53	8,33	8,25	10,04
	- Spesialis	17,15	18,61	21,95	21,75	22,95
2	Perawat	317,34	148,07	248,28	246,05	344,91
3	Bidan	45,22	34,11	50,72	50,26	65,25
4	Ahli Gizi/Nutrisi	16,37	13,18	12,11	18,75	27,25
5	Paramedis Lainnya	232,35	73,65	71,91	71,26	143,41

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2010

Disamping itu, tingkat kesehatan masyarakat juga didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, baik sarana maupun prasarana. Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Blitar selama ini selain disediakan oleh pemerintah juga oleh swasta, dan masyarakat. Adanya pembagian peran dalam penyediaan fasilitas kesehatan tersebut mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan, perlindungan dan jaminan kesehatan.

Untuk mengetahui lebih terperinci ketersediaan fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat dan rasio perbandingannya dengan jumlah penduduk di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

No	Jenis Sarpras	Rasio Fasilitas Kesehatan per 1000 Penduduk				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Rumah Sakit + RSB	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
2	Puskesmas + Pustu + Klinik KB	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2010

Dari rasio tersebut diatas diketahui bahwa rasio fasilitas kesehatan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena perkembangan fasilitas kesehatan tidak sebanding dengan perkembangan Jumlah pertambahan penduduk.

Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan adalah dengan melihat Angka Kematian Bayi (AKB). AKB Kota Blitar tahun 2009 sebesar 12,93 sedangkan tahun 2005 sebesar 3,75 terlihat ada peningkatan, Indikasi penyebab kematian bayi terbesar adalah faktor Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya karena rendahnya tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pengetahuan serta status kesehatan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 :

Tabel 2.23
Angka Kematian Bayi per – 1000 Kelahiran Hidup Kota Blitar

Tahun	Jumlah Kematian	Angka Kematian Bayi per – 1000 Kelahiran Hidup
2005	8	3,75
2006	4	1,85
2007	6	3,06
2008	9	4,10
2009	26	12,93

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2010

Tidak berbeda jauh dengan AKB, angka kematian Balita di Kota Blitar dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan trend peningkatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24.
Angka Kematian Balita per – 10.000 kelahiran hidup Kota Blitar

No	Tahun	Jumlah Kematian	Angka Kematian Balita
1	2005	8	3,76
2	2006	4	1,85
3	2007	10	5,21
4	2008	10	5,56
5	2009	27	13,44

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2010

Dari tabel di atas diketahui jika pada tahun 2009 AKB sebesar 13,44 per 10.000 kelahiran hidup atau terdapat 27 kematian balita dari 2.054 kelahiran hidup.

Sedangkan Angka Kematian Ibu melahirkan per 10.000 kelahiran hidup, pada tahun 2009 adalah sebesar 49,72 atau angka riilnya ada 1 orang ibu melahirkan yang meninggal dari sebanyak 1.611 kelahiran hidup, angka ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 91,16.

Tabel 2.25
Angka Kematian Ibu per – 10.000 Kelahiran Hidup Kota Blitar

No	Tahun	Jumlah Kematian	Angka Kematian Ibu
1	2005	1	46.95
2	2006	0	0
3	2007	2	100,2
4	2008	2	91.16
5	2009	1	49.72

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2010

2.5. Perekonomian

2.5.1 Perkembangan PDRB

Perkembangan PDRB kota Blitar mulai tahun 2005 sampai dengan 2009 naik secara signifikan seiring dengan pelaksanaan

program pembangunan, untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) naik dari 827.212.608 menjadi 1.425.899.058 atau naik sekitar 72,37 %, tapi bila dilihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) kenaikannya 26,94% yaitu dari 574.442.037 menjadi 729.202.632. Selengkapnya untuk mengetahui perkembangan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26.
PDRB Kota Blitar atas dasar harga berlaku dan harga konstan
tahun 2005 – 2009 (ribu rupiah)

No.	Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK
1	2005	827.212.608	574.442.037
2	2006	969.306.623	608.298.096
3	2007	1.092.736.403	645.936.355
4	2008*)	1.265.357.176	686.549.150
5	2009**)	1.425.899.058	729.202.632

Sumber Data :BPS Kota Blitar Tahun 2010

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju inflasi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang kerap digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di wilayah tersebut. Secara umum, perekonomian Kota Blitar tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 6,21 %, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada pada angka 4,88 %. Inflasi PDRB tahun 2009 tercatat sebesar 6,10%

lebih rendah dari tahun 2008 sebesar 8,95%. Penurunan laju inflasi PDRB ini karena kecukupan pasokan barang dan bahan kebutuhan. Laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi kota Blitar dalam rentang waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Laju Pertumbuhan dan Laju Inflasi PDRB Kota Blitar
Tahun 2005 - 2009

Sektor	Laju Pertumbuhan					Laju Inflasi				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	1,13	1,17	1,23	0,91	5,15	17,04	12,13	8,17	8,04	9,65
Pertamb.&Penggalian	0,47	-18,02	-8,38	-5,24	-3,27	12,23	2,64	7,89	6,10	5,06
Industri Pengolahan	7,49	4,96	5,01	2,10	4,95	11,79	13,65	5,22	10,44	8,10
Listrik, gas dan air	6,16	9,86	7,58	8,16	6,84	6,95	6,48	2,84	3,89	3,67
Bangunan	4,44	5,15	5,83	12,42	11,19	12,50	12,78	7,33	10,84	8,96
Perdagangan,Hotel& Restoran	1,71	9,44	6,86	9,08	8,40	11,92	12,20	7,37	10,64	5,39
Angkutan &Komunikasi	-3,53	5,54	11,33	7,50	5,32	18,05	3,10	3,96	5,84	3,75
Keuangan,Persewaan &Jasa Perusahaan	5,41	4,33	5,17	6,89	4,52	11,64	10,92	5,52	9,11	4,82
Jasa-jasa	7,66	5,60	5,43	4,72	4,90	12,02	11,70	8,82	8,69	5,94
PDRB	5,71	5,89	6,19	6,29	6,21	13,01	10,66	6,49	8,95	6,10

Sumber data: BPS Kota Blitar tahun 2010

Dari tabel diatas terlihat jika inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM yang selajutnya memicu kenaikan harga hampir semua barang kebutuhan, sehingga inflasipun ikut terkerek naik.

Pertumbuhan PDRB Kota Blitar dari tahun-ketahun relatif berfluktuasi tergantung pada kondisi perekonomian nasional dan regional termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terutama masalah harga BBM.

2.5.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan regional per kapita penduduk merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai

balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi di suatu wilayah selama satu tahun. Pendapatan regional per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun ukuran ini belum mencakup kesenjangan antar penduduknya. Pendapatan regional per kapita didapat dari PDRB yang sudah dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung kemudian dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan pendapatan regional perkapita di Kota Blitar dalam lima tahun mulai 2005 sampai pada akhir 2009 baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.28
PDRB Perkapita Kota Blitar 2005-2009

No	TAHUN	PDRB PERKAPITA	
		ADHB	ADHK (2000)
1.	2005	Rp. 5.883.985,-	Rp. 3.954.098,-
2.	2006	Rp. 7.437.018,-	Rp. 4.681.665,-
3.	2007	Rp. 8.333.802,-	Rp. 4.926.262,-
4.	2008	Rp. 9.565.893,-	Rp. 5.190.199,-
5.	2009	Rp. 10.688.258,-	Rp. 5.465.959,-

Sumber : BPS Kota Blitar Tahun 2010

Pada tahun 2009, jika PDRB perkapita tersebut dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 719.357,- per bulan atau Rp. 8.632.284,- bila terjadi pemerataan sempurna maka bisa dikatakan semua penduduk Kota Blitar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Namun kalau melihat angka kemiskinan Kota Blitar yang relatif kecil, bisa disimpulkan angka ketimpangan pendapatan di Kota Blitar tidaklah terlalu besar.

2.5.4 Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Pada umumnya perkembangan perekonomian daerah pada wilayah perkotaan digerakkan oleh sektor sekunder maupun tersier,

sedangkan wilayah pedesaan bertumpu pada sektor primer. Daerah yang ekonominya berbasis pada sektor sekunder maupun tersier cenderung lebih maju dibandingkan daerah dengan basis sektor primer. Sejalan dengan statusnya, roda ekonomi Kota Blitar juga digerakkan oleh sektor tersier, bahkan dominasinya mencapai 70 persen dari total nilai tambah yang dihasilkan di Kota Blitar. Dengan luas yang hanya 32,58 km² , Kota Blitar tidak banyak memiliki produk pertanian yang bisa diandalkan dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Blitar.

Dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) struktur ekonomi kota Blitar didominasi oleh sektor tersier terutama sub sektor Perdagangan dan Jasa, hal ini selaras dengan visi misi yang ingin dicapai Kota Blitar tahun 2010. Sampai akhir tahun 2009, sektor primer menyumbang sebesar 8,89 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan jika sektor primer terutama pertanian mengalami peningkatan produktifitas yang cukup besar, mengingat setiap tahunnya lahan sawah mengalami penyusutan rata-rata hampir 10 Ha. Sementara sektor sekunder pada tahun 2009 kontribusinya juga sedikit mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya, jika pada tahun 2008 mencapai 21,86 % mengalami peningkatan menjadi 22,39 %. Disisi lain, dengan naiknya kontribusi sektor primer dan sekunder secara otomatis sumbangan sektor tersier mengalami sedikit penurunan, jika pada tahun 2008 sebesar 69,74 %, maka pada tahun 2009 turun menjadi 69,03 %. Selengkapnya bisa disimak pada tabel berikut ini :

Tabel 2.29.
Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Blitar Tahun 2005 – 2009 (%)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	9,67	9,69	8,86	8,35	8,54
Pertamb.&Penggalian	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
Sektor primer	9,73	9,74	8,92	8,40	8,59
Industri Pengolahan	13,35	14,06	13,06	12,72	12,81
Listrik, gas dan air	2,98	3,09	2,84	2,75	2,71
Bangunan	5,99	5,85	5,94	6,39	6,87
Sektor Sekunder	22,32	23,00	21,84	21,86	22,39
Perdagangan, Hotel&Restoran	20,94	22,03	22,80	23,76	24,09
Angkutan &Komunikasi	12,98	12,92	12,74	12,52	12,14
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	14,17	13,37	13,89	13,99	13,60
Jasa-jasa	19,84	18,91	19,81	19,47	19,20
Sektor tersier	67,95	67,26	69,24	69,74	69,03
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Blitar Tahun 2010

2.5.5 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Revitalisasi fungsi dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi sebagai manifestasi dari semangat ekonomi kerakyatan, Koperasi diharapkan mampu menjadi sebuah badan usaha yang profesional dan menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Kota Blitar.

Hasil pengembangan kinerja koperasi di Kota Blitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Perkembangan Keragaan Koperasi 2005-2009

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009
1	Koperasi Aktif	184	189	204	207	202
2	Koperasi Tidak Aktif	60	59	60	66	67
3	Koperasi Baru	4	11	14	-	25
4	Jumlah Koperasi	248	259	261	273	294
5	RAT	114	124	114	104	103
6	Audit Tutup Buku	114	124	114	104	103
7	Jumlah Anggota	21.474	19.584	19.871	20.404	21.185
8	Jumlah Karyawan	373	379	481	549	571

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Tahun 2010

Selanjutnya dari Potensi Koperasi sebagaimana tersebut diatas, akan terlihat jelas bagaimana kualitas Koperasi tersebut dengan melihat jumlah modal dari Koperasi tersebut. Selengkapnya untuk mengetahui perkembangan permodalan Koperasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Perkembangan Permodalan Koperasi 2005-2009

NO	URAIAN	NILAI DANA (ribuan rupiah)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Modal Sendiri	20.770.595	23.553.653	27.100.383	32.076.309	39.880.946
2.	Modal Luar	20.400.954	26.929.325	32.223.842	36.529.391	44.794.519
3.	Asset	39.596.231	50.219.937	60.957.156	65.456.407	80.878.613
4.	Volume Usaha	34.003.944	54.667.001	67.305.472	81.207.360	92.440.398
5.	SHU	2.700.749	3.145.204	3.254.723	3.582.198	4.338.543

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Daerah Tahun 2010

Dari data tersebut terlihat jelas ada peningkatan baik dari segi jumlah koperasi dari tahun 2005 ke tahun 2009 maupun dari segi permodalannya. Bahkan di setiap kelurahan sudah terdapat koperasi kelurahan sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi mereka sekaligus sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di kelurahan-kelurahan.

Selain Koperasi penopang pertumbuhan ekonomi yang lainnya adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM), IKM tersebut terbagi dalam kategori Kelompok Industri Formal dan Kelompok Industri Non Formal. Dari kedua kategori tersebut Kelompok Industri Non Formal mempunyai peran lebih besar dari segi jumlah unit usaha maupun penyerapan tenaga kerja bila dibandingkan dengan Kelompok Industri Formal. Berikut ini data Industri Kecil dan Menengah Kota Blitar Tahun 2009 yang diklasifikasikan berdasarkan Kecamatan.

Tabel 2.32
Data IKM Kota Blitar Tahun 2009

NO	KECAMATAN	IKM	SENTRA INDUSTRI	KOMODITI UNGGULAN	INDUSTRI FORMAL	INDUSTRI NON FORMAL
1	SUKOREJO	894	40	13	33	861
2	KEPANJENKIDUL	617	35	217	51	566
3	SANANWETAN	456	31	26	28	428
	JUMLAH	1967	106	256	112	1855

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2010 yang diolah

Apabila dilihat dari cabang industri yang ada maka potensi industri kecil non formal di Kota Blitar pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33
Data Industri Kecil Non Formal Menurut Cabang Industri Tahun 2009

NO	CABANG INDUSTRI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA (Orang)	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)	NILAI PRODUKSI (Rp.000,-)
1	Makanan dan Minuman	813	1.748	1.907.085	22.309.272
2	Sandang dan Kulit	280	603	550.250	8.371.934
3	Kimia dan Bangunan	178	403	556.400	11.428.454
4	Logam dan Elektronika	267	566	959.950	9.623.320
5	Kerajinan dan Umum	317	828	997.285	19.252.157
	JUMLAH	1.855	4.148	4.970.970	70.985.137

Sumber: Disperindag Kota Blitar, 2010

2.6. Infrastruktur Wilayah

2.6.1 Perumahan

Upaya yang dilaksanakan di bidang perumahan disamping dengan memberikan arahan bagi pemenuhan kebutuhan lahan perumahan yang akan dilaksanakan oleh para pengembang agar sesuai dengan rencana tata ruang, juga dengan memfasilitasi revitalisasi rumah kumuh/tidak layak huni.

Dalam pelaksanaan revitalisasi tersebut Pemerintah Kota Blitar berpedoman pada surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/243/422.010.2/2005, tentang “Data Rumah Kumuh Kota Blitar Tahun 2005”. Berdasarkan keputusan tersebut jumlah sasaran penerima program rumah kumuh sejumlah 1.115 rumah yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjenkidul dan Kecamatan Sukorejo.

Dalam pelaksanaannya sesuai SK Walikota tersebut, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena harus menyesuaikan dengan anggaran pada tahun berjalan. Artinya sisa rumah kumuh pada tahun lalu dilaksanakan pada tahun ini dan sisa tahun ini dikerjakan pada tahun berikutnya sampai habis. Adapun perkembangannya sebagai berikut :

Tabel 2.34
Realisasi Pembangunan Rumah BR2K

No	Kecamatan	Tahun					
		2006		2007		2008	
		Sasaran	realisasi	Sasaran	realisasi	Sasaran	realisasi
1.	Kepanjenkidul	321	83	283	187	51	51
2.	Sananwetan	266	82	184	173	11	11
3.	Sukorejo	528	98	430	209	221	221
Jumlah		1.115	263	852	569	283	283

Sumber data : Kecamatan se Kota Blitar Tahun 2008

2.6.2 Fasilitas Umum

2.6.2.1 Jalan dan Jembatan

Berdasarkan status jalan, Kota Blitar memiliki jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan jalan desa/lokal. Kondisi dan kualitas jalan di Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami

perkembangan yang cukup pesat khususnya dalam peningkatan kualitas jalan dimana panjang jalan diaspal terus mengalami peningkatan yang diikuti dengan penurunan panjang jalan yang masih berupa tanah. Disisi lain, dari tahun ketahun kondisi jalan dalam kategori baik juga terus mengalami peningkatan, untuk mengetahui perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Kondisi Jalan Menurut Jenis, dan Kelas Jalan

No	Keadaan	Panjang Jalan (Km)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Jenis Permukaan					
	1. Diaspal	205,410	205,410	222,439	224,766	234,262
	2. Kerikil	-	-	-	-	-
	3. Tanah	66,808	66,808	38,578	38,851	29,355
	4. Lainnya	-	-	11,221	11,221	11,221
	Jumlah	272,238	272,238	272,238	274,838	274,838
2.	Kondisi Jalan					
	1. Baik	137,765	160,715	176,799	196,669	241,669
	2. Sedang	100,955	78,005	64,255	50,984	30,985
	3. Rusak	33,518	33,518	31,184	27,184	2,184
	4. Rusak Berat	-	-	-	-	-
	Jumlah	272,238	272,238	272,238	274,838	274,838
3.	Kelas Jalan					
	1. Kelas I	-	-	-	-	-
	2. Kelas II	13,510	13,510	13,510	13,510	13,510
	3. Kelas III	23,867	23,867	23,867	23,867	23,867
	4. Kelas III A	168,053	168,053	180,662	180,662	180,662
	5. Kelas III B	-	-	-	-	-
	6. Kelas III C	-	-	4,400	5,228	5,228
	7. Tak dirinci	66,808	66,808	49,799	51,571	51,571
	Jumlah	272,238	272,238	272,238	274,838	274,838

Sumber: Dinas PU Daerah Kota Blitar tahun 2010

Sedangkan jembatan di Kota Blitar sampai pada tahun 2009, banyak jembatan yang dibangun dan direhabilitasi guna menunjang kelancaran lalu lintas dan transportasi yang pada akhirnya mampu mendukung distribusi dan proses produksi barang khususnya di sentra-sentra industri kecil, sehingga kondisi jalan dan jembatan di kota Blitar yang sangat memadai tersebut dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

2.6.2.2 Kelistrikan, Pos dan Telekomunikasi

Secara umum ketiga infrastruktur tersebut di Kota Blitar sudah tersedia secara merata di seluruh wilayah dan hampir tidak ada wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik. Untuk mengetahui perkembangan pelanggan, daya terpasang dan pemakaian listrik selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36.
Data Perkembangan Pelanggan, Daya Terpasang,
dan Pemakaian Listrik Tahun 2005 -2009

NO	Tahun	Pelanggan	Daya/VA	Pemakaian (KWH)
1	2005	29.548	28.993.931	50.483.064
2	2006	29.945	33.514.065	59.483.064
3	2007	30.571	35.606.465	63.328.450
4	2008	31.384	37.881.865	32.667.862
5	2009	32.392	43.635.485	40.255.890

Sumber : PT.PLN Tahun 2010 yang diolah

Di Kota Blitar jasa Pos dilayani di dua tempat yaitu di Kantor Pos Pusat dan Kantor Pos Pembantu di Wilayah Kecamatan Sananwetan. Potensi pemanfaatan jasa pos di wilayah Blitar seiring dengan meningkatnya Teknologi informasi ternyata tidak menurunkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa Pos ini, untuk mengetahui perkembangan jasa pos di wilayah Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Pengiriman dan penerimaan surat menurut jenisnya di kantor pos
Tahun 2005 -2009

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009
I.	<u>Pengiriman</u>					
1.	Kantong	-	4.897	8.797	10.363	10.613
2.	Surat Biasa	136.712	234.601	561.777	580.420	591.214
3.	Surat Tercatat	9.974	12.972	7.109	10.331	10.416
4.	Paket	17.008	19.344	30.555	423.321	423.563
5.	Surat Kilat Khusus	103.562	154.365	203.441	215.005	215.134
II.	<u>Penerimaan</u>					
1.	Kantong	4.489	23.456	20.897	33.201	33.407
2.	Surat Biasa	987.566	1.021.402	2.654.661	2.885.002	2.856.028
3.	Surat Tercatat	8.233	9.322	7.692	6.882	6.925
4.	Paket	31.197	41.263	88.609	93.251	93.319
5.	Surat Kilat Khusus	103.194	104.926	500.297	560.325	561.014

Sumber: Kantor Pos Blitar Tahun 2010

Pada sisi lain dengan seiring kemudahan akses jaringan informasi yang berbasiskan seluler membuat perubahan pola penggunaan dan layanan komunikasi dari yang berbasiskan kabel (*fixed*) menjadi seluler. Kondisi perkembangan layanan komunikasi di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Pelanggan Sambungan Telepon Tahun 2005 -2009

No	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009
A.	<i>Subscriber</i>					
1.	Rumah Tangga	11.878	27.437	27.837	28.339	26.398
2.	Sosial	75	148	146	144	131
3.	Bisnis	2.200	3.425	2.661	2.350	2.020
4.	Kantor/Prsh.	-	110	161	160	164
5.	Flexi	-	2.682	3.153	2.122	3.920
II.	<i>Public Phone</i>					
1.	TUC	178	110	218	170	170
2.	TUK	-	-	-	-	-
3.	Telepin	-	-	-	-	-
4.	Wartel A	34	-	-	-	-
5.	Wartel B	2	-	-	-	-
6.	Warung Telkom	715	2.048	1.781	1.632	1.310
7.	Warnet	17	15	12	11	11

Sumber: PT. Telkom Blitar Tahun 2010

2.6.2.3 Irigasi, Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Salah satu upaya untuk peningkatan produksi pertanian maka diperlukan irigasi yang berkualitas, kondisi irigasi di perkotaan khususnya di Kota Blitar disamping berfungsi sebagai sarana pengairan sawah di wilayah Kota Blitar, juga berfungsi sebagai pembuangan limbah drainase di wilayah Kota Blitar. Perkembangan kondisi irigasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Kondisi Irigasi Sawah Kota Blitar Tahun 2009

NO	Jenis Irigasi	Panjang Irigasi 2009
1.	Irigasi Tekhnis	0
2.	Irigasi ½ Tekhnis	22.990
3.	Irigasi Sederhana	30.325
	JUMLAH	53.315

Sumber: Dinas Pertanian Kota Blitar Taun 2010

Kebutuhan akan ketersediaan air minum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, didalam penyediaannya masih tergantung pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana dalam perkembangannya selalu mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan di Kota Blitar. Untuk mengetahui perkembangan perkembangan dalam pelayanan air minum dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.40
Perkembangan Pelayanan Air Oleh PDAM Kota Blitar Tahun 2005-2009

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Sumur (Unit)	16	17	19	19	19
	a. Berfungsi (unit)	7	6	7	7	7
	b. Standar (Unit)	-	-	1	2	2
	c. Rusak (Unit)	8	10	10	10	10
	Sumber Mata Air	1	1	1	1	1
2.	Debet Air (litr/det)	874	992	952	1.213	1.347,5
3.	Jam Operasional (jam)	37.039	42.796,5	46.335	43.718	2.3
4.	Produksi air (m³)	1.608.594	1.879.127	2.078.812	1.748.929	2.303.722
5.	Air Terjual (m³)	1.305.408	1.305.447	1.242.204	1.177.429	1.090.609
6.	Pelanggan (SR)	9.578	9.578	9.662	10.089	10.361
7.	Kebocoran Air (m³)	579.277	573.680	836.588	571.500	880.782
8.	Pendapatan (Rp)	1.239.470.975	1.239.794.325	2.033.269.750	2.083.892.548	2.746.183.925

Sumber : PDAM Kota Blitar Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2009 produksi air PDAM Kota Blitar sebesar 2.303.722 m³, air terjual sebesar 1.090.609 m³ sedangkan jumlah pelanggan 10.361 SR. Sedangkan pendapatan PDAM mengalami kenaikan sebesar 31,78 % menjadi Rp. 2.746.183.925,00 pada tahun 2009 dibanding tahun 2005 sebesar Rp. 1.239.470.975,00. Kenaikan pendapatan tertinggi pada tahun 2007 hingga mencapai Rp. 2.033.269.750,00.

Sumber utama air bersih di Kota Blitar adalah berasal dari air permukaan yang kondisinya relatif tetap, karena mengikuti daur hidrologi. Saat ini cadangan sumberdaya air di Kota Blitar dapat dikatakan masih surplus, baik dari air permukaan, air tanah maupun air hujan. Cadangan sumberdaya air yang cukup banyak berasal dari air permukaan, yang paling banyak di Kelurahan Pakunden sebesar 325,796 juta/m³, KelurahanTanggung sebesar 205,829 juta/m³, Kelurahan Ngadirejo sebesar 89,783 juta/m³, Kelurahan Sentul sebesar 163,974 juta/m³ dan yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Turi sebesar 1.89 juta/m³. Selain itu juga terdapat sumber mata air yang jumlahnya 25 sumber air, dengan sumber terbesar Wayuh yang mempunyai luas 400 m² dan sumber Pakunden yang mempunyai luas 300 m² yang kesemuanya terletak di Kelurahan Pakunden.

2.7. Pariwisata dan Budaya

2.7.1 Potensi Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang penting dan strategis bagi Kota Blitar, karena perannya sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kota Blitar. Dapat dikatakan bahwa industri pariwisata

Kota Blitar saat ini dan ke depan memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif terutama dengan keberadaan makam Bung Karno sebagai ikon sekaligus " *pembeda* " dengan daerah-daerah lainnya.

Untuk itu, komitmen dan konsistensi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penerapannya perlu dititikberatkan pada strategi pengembangan obyek wisata terutama wisata sejarah; memanfaatkan posisi kota Blitar yang berada diantara daerah tujuan wisata Bali, Malang dan Jogjakarta; Meningkatkan citra kota Blitar sebagai laboratorium kebangsaan dengan menggelar berbagai event yang mendukung; pengembangan pemasaran dan promosi yang tepat dengan menggunakan berbagai media yang ada; serta pengembangan kemitraan, investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya meningkatkan kapasitas kepariwisataan di Kota Blitar tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama kunjungan wisatawan, sehingga mereka akan lebih banyak membelanjakan uangnya di kota Blitar yang pada gilirannya akan memberikan *multiplayer effect* untuk semakin meningkatkan akselerasi perputaran roda ekonomi Kota Blitar.

Tercatat ada sejumlah obyek wisata di Kota Blitar yaitu terdiri atas obyek wisata buatan dan sejarah/minat khusus. Obyek wisata buatan berjumlah 3 buah yaitu Kebun Rojo, Water Park Sumber Udel dan Kampung Wisata Kel. Tanggung. Sedangkan obyek wisata sejarah/minat khusus berjumlah 5 buah yaitu Makam Aryo Blitar,

Monumen PETA, Ndalem Gebang, Makam Proklamator dan Perpustakaan Bung Karno yang merupakan obyek wisata baru. Wisata sejarah, religi dan hiburan ini dalam setiap tahun ramai dikunjungi wisatawan khususnya pada saat even Grebeg Pancasila dan Haul Bung Karno, misalnya.

2.7.2 Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sampai dengan akhir 2009 jumlah jasa komodasi di Kota Blitar tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari segi jumlah dari tahun 2005 sampai dengan 2009 hanya bertambah 1 unit. Sedangkan dilihat dari jumlah tempat tidur mengalami perubahan dari 775 menjadi 802 unit sedangkan pada penginapan jumlahnya tetap akan tetapi jumlah tempat tidurnya malah menurun.

Dari kondisi sarana tersebut Jumlah kunjungan wisatawan ke kota Blitar dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan. Jika tahun 2008 kota Blitar dikunjungi 447.067 orang maka pada tahun 2009 jumlah tersebut mencapai 485.053 orang atau rata-rata tiap harinya wisatawan yang berkunjung ke kota Blitar lebih dari 1.328 orang.

Tabel 2.41

**Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung ke Kota Blitar
Tahun 2005-2009**

No	Asal Wisatawan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Wisatawan Nusantara	269.318	299.365	321.103	446.466	484.256
2.	Wisatawan Mancanegara	235	6	610	601	797
Jumlah		269.318	299.371	321.713	447.067	485.053

Sumber : Dinas Kominparda Tahun 2010

Sementara itu lama tinggal (*length of stay*–LOS) wisatawan di Kota Blitar dapat dilihat dari tingkat hunian hotel yang ada di kota Blitar, berdasarkan data dari PHRI kota Blitar jumlah tamu yang menginap di hotel kota Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.42.

**Jumlah tamu yang menginap di Hotel yang ada di Kota Blitar
Tahun 2005-2009**

No	Kewarganegaraan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	WNI	104.964	68.293	98.632	124.989	98.707
2.	WNA	975	1.339	1.133	1.108	940
Jumlah		105.939	69.632	99.765	126.097	99.647

Sumber : Dinas Kominparda Tahun 2010

Dari data diatas terlihat tamu yang menginap jumlahnya fluktuaktif, jika pada tahun 2005 mencapai 105.939 orang pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional maka pada tahun 2007 sampai 2008 terjadi tren kenaikan dimana pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 126.097 tamu, kemudian jumlahnya menurun lagi pada tahun 2009 menjadi 99.647 tamu. Rata-rata jumlah tamu/wisatawan yang menginap perharinya pada tahun 2009 sebanyak 273 orang, dengan jumlah kamar yang tersedia mencapai 555 buah, maka secara umum tingkat hunian hotel di kota Blitar pada tahun 2009 mencapai 49,27 persen.

2.7.3 Budaya Masyarakat

Pengembangan kebudayaan di Kota Blitar diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat budaya lokal ditengah pengaruh

gelombang besar budaya global dengan segala perniknya baik yang bersifat positif maupun negatif. Berkembangnya kebudayaan lokal sebagai jati diri bangsa akan memperkuat citra kota Blitar sebagai “ *Laboratorium Kebangsaan* “ sekaligus menegaskan kota Blitar sebagai kota pariwisata sejarah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kebudayaan di kota Blitar antara lain dengan menggali seni dan budaya tradisional agar tetap lestari, kemudian mengembangkannya menjadi kesenian yang bisa diterima dan dinikmati generasi masa kini, sekaligus sebagai inspirasi munculnya seni dan budaya baru yang penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Beberapa event budaya yang bernuansa religi dan sejarah yang digelar rutin setiap tahun di Kota Blitar antara lain : Grebek Pancasila, Haul Bung Karno, Peringatan Pemberontakan PETA, Hari Jadi Kota Blitar, Bersih Desa Kelurahan Blitar.

2.8. Kehidupan Sosial dan Keagamaan

2.8.1 Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Salah satu permasalahan hampir disemua perkotaan di Indonesia adalah adanya penduduk yang dikategorikan kurang mampu/miskin, yang ini merupakan tanggungan dari Pemerintah untuk mengentaskannya dari kondisi tersebut. Dari segi jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil pendataan BPS pada tahun 2005, perkembangannya mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Beberapa hal menjadi penyebab penurunan jumlah penduduk miskin ini tetapi harus diakui, adalah melalui program dan kegiatan Rencana Aksi Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) Kota Blitar yang

implementasinya termasuk partisipasi seluruh komponen pemerintahan dan kontribusi aktif dari masyarakat yang pada akhirnya telah memberikan kontribusi nyata dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah Rumah Tangga Miskin atau Penduduk miskin mulai tahun 2006 sampai dengan kondisi terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Perkembangan RTM di Kota Blitar Tahun 2006-2009

No	Kecamatan	Jumlah RT Miskin				Jumlah Jiwa Miskin			
		2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
1	Kepanjenkidul	1.375	1.304	1.287	1.267	4.795	4.438	4.356	3.969
2	Sananwetan	1.336	1.282	1.267	1.696	4.558	4.292	4.236	5.061
3	Sukorejo	2.024	1.961	1.943	1.325	7.267	6.866	6.768	4.152
Jumlah Kota		4.735	4.547	4.497	4.288	16.620	15.596	15.360	13.182

Sumber Data : BPS 2008 dan Hasil Pengolahan 2009

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa dengan menggunakan indikator yang ditentukan oleh BPS terjadi penurunan yang cukup drastis, khususnya dari segi jumlah jiwanya yaitu sebesar 15,48 % (3438 jiwa), sedangkan apabila dilihat dari data jumlah Rumah Tangga / Kepala Keluarga pada kurun waktu tahun 2006-2009 terjadi penurunan 5,70% (447 RTM).

Selanjutnya apabila dilihat dari segi klasifikasi Rumah Tangga Miskin (RTM) didapat bahwa sesuai dengan kriteria dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membagi penduduk miskin menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu sangat miskin, miskin dan hampir miskin persebaran jumlah RTM hampir merata di seluruh kecamatan. Lebih lanjut dapat dilihat dengan urutan sebagai berikut : Kecamatan Sukorejo jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) mencapai 1.696, kemudian

Sananwetan dengan jumlah 1.325 RTM dan Kepanjenkidul sebanyak 1.267 RTM. Sementara Rembang tercatat sebagai kelurahan dengan jumlah RTM paling sedikit yaitu hanya 72 RTM, sedangkan kelurahan dengan jumlah RTM terbanyak adalah Sukorejo yang mencapai 557 RTM. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.42

Tabel 2.44
Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Klasifikasi
Tahun 2009

KECAMATAN	RUMAH TANGGA			
	SANGAT MISKIN	MISKIN	HAMPIR MISKIN	JUMLAH
Kecamatan Sukorejo	523	745	428	1.696
Kecamatan Kepanjenkidul	135	480	652	1.267
Kecamatan Sananwetan	126	497	702	1.325
KOTA BLITAR	784	1.722	1.782	4.228

Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2009.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS merupakan Masalah sosial yang selalu melekat dengan perkembangan masyarakat. Apabila masalah sosial dibiarkan akan menjadi pathologi/penyakit masyarakat. Untuk mengetahui jumlah PMKS di

Kota Blitar dalam kurun waktu tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Perbandingan jumlah PMKS di Kota Blitar tahun 2006 - 2009

NO	JENIS	JUMLAH			
		2006	2007	2008	2009
1	Penyandang cacat	385	430	430	454
2	Tuna susila			-	10
3	Gelandangan	42	7	7	10
4	Gelandangan psikotik	6	11	11	3
5	Pengemis	35	20	20	46
6	Bekas narapidana	44	91	91	71
7	Anak nakal	27	13	13	12
8	Anak jalanan	68	46	46	23
9	Anak terlantar	45	69	69	221
10	Balita terlantar	0*	66	16	30
11	Pekerja migran terlantar			-	1
12	Lanjut usia terlantar	290	338	338	230
13	Keluarga masalah sosial psikologis	5	22	22	205
14	Korban penyalahgunaan napza			-	16
15	Wanita rawan sosial ekonomi	37*	359	359	368
16	Keluarga rentan (KK)			-	353
17	Keluarga berumah tak layak huni (KK)	358		-	593
18	Korban bencana alam	150	4	4	-
19	Korban bencana sosial/pengungsi	292	2	2	1

Sumber : Dinas Sosnaker Daerah Kota Blitar Tahun 2009

Catatan :

* Balita dan Wanita terlantar : ada perubahan indikator baku dari Propinsi Jawa Timur sehingga terlihat kenaikan yang mencolok.

Dari data PMKS selama kurun waktu tahun 2006 – 2009 diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan PMKS setiap tahunnya, terjadi peningkatan dan penurunan jumlahnya seringkali fluktuatif sebagaimana karakteristik PMKS itu sendiri yang cenderung memiliki tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamik, sering berpindah-pindah alias tidak menetap, sehingga jumlahnya-pun juga selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kenaikan PMKS disebabkan disamping karena kriteria penentuan masing-masing indikator yang dipakai sebagai pengukuran tidak sama setiap tahunnya, juga karena adanya urban dari daerah lain yang masuk ke Kota Blitar, sedangkan untuk

penurunan PMKS antara lain merupakan dampak positif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar.

2.8.2 Kehidupan Beragama

Secara umum kehidupan beragama di Kota Blitar sangat kondusif yang ditandai dengan adanya kerukunan umat beragama. Pemeluk agama dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing dengan tenang dan aman tanpa pernah terjadi konflik. Kuatnya masyarakat dalam menjaga dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari merupakan modal dasar bagi terwujudnya situasi yang kondusif serta partisipasi dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan komposisi pemeluknya, sebagian besar penduduk Kota Blitar beragama Islam kemudian disusul agama Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Konghuchu seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.46
Penduduk Menurut Agama Tahun 2005-2009

No	Tahun	Agama					
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu
1	2005	117.513	4.594	4.737	591	820	*)
2	2006	116.847	5.392	5.341	599	811	*)
3	2007	119.674	5.509	5.467	624	833	*)
4	2008	120.468	5.601	5.748	569	815	105
5	2009	125.561	6.139	6.517	418	730	106

Sumber : Kementrian Agama Kota Blitar Tahun 2010

*) tidak tersedia datanya

Dari data diatas diketahui jika komposisi jumlah pemeluk agama di Kota Blitar cenderung tidak berubah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya ada penambahan sejak tahun 2008 sesuai

dengan Keputusan Pemerintah yang menjadikan ajaran Konghuchu sebagai agama.

Sesuai dengan komposisi pemeluknya bahwa diatas 90 persen penduduk Kota Blitar beragama Islam, maka masjid dan langgar/mushola merupakan tempat ibadah yang paling banyak dijumpai di Kota Blitar. Tahun 2009, jumlah masjid sebanyak 99 buah, sedangkan jumlah langgar/mushola 285 buah. Jumlah gereja pada tahun 2009 sebanyak 28 buah, klenteng sebanyak 1 unit dan vihara ada 2 buah yang selengkapnya bisa disimak pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47
Perkembangan Tempat peribadatan Tahun 2005-2009

No	TAHUN	TEMPAT PERIBADATAN					
		MASJID	LANGGAR	GEREJA	PURA	WIHARA	KLENTENG
1	2005	95	272	27	-	2	1
2	2006	95	285	28	-	2	1
3	2007	99	285	28	-	2	1
4	2008	99	285	28	-	2	1
5	2009	99	285	28	-	2	1

Sumber : Kementrian Agama Kota Blitar Tahun 2010

Dari tabel diatas diketahui jika jumlah tempat ibadah di kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun 2005-2009 relatif tidak mengalami penambahan. Hanya pada tahun 2006 saja terjadi peningkatan jumlah Mushala/Langgar sebanyak 13 buah, bila pada tahun 2005 jumlahnya 272, maka pada tahun 2006 menjadi 285 buah. Selain itu, dari tabel diatas diketahui jika selama ini di kota Blitar belum ada tempat peribadatan untuk pemeluk agama Hindu, yaitu Pura. Selama ini pemeluk agama Hindu di kota Blitar masih harus menggunakan Pura yang ada di wilayah kabupaten Blitar untuk melaksanakan ibadah sesuai agama yang dipeluknya.

2.9. Politik, Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

2.9.1 Kondisi Politik Daerah

Kondisi sosial politik di Kota Blitar relatif kondusif sehingga hampir tidak pernah terjadi gejolak yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan kedewasaan berpolitik yang cukup tinggi, masyarakat kota Blitar mampu melaksanakan pesta demokrasi mulai dari Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur dan pemilihan walikota dengan lancar dan aman dalam semangat kebersamaan. Partisipasi masyarakat Kota Blitar dalam politik cukup tinggi hal ini bisa dilihat dari indikator angka partisipasi dalam menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemilu yang secara umum selalu diatas 70 %.

2.9.2 Kondisi Trantibmas

Salah satu faktor penentu dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah adanya personil pengamanan yang ada, baik polisi, TNI dan potensi masyarakat. Lebih jauh untuk mengetahui kondisi personil pengamanan di Kota Blitar.

Potensi pengamanan yang berasal dari masyarakat salah satunya adalah unsur pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat (Linmas). Kondisi potensi ini selalu dibutuhkan baik dalam acara lokal maupun nasional misalnya dalam pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/DPR/DPRD, Pemilu Kepala Daerah provinsi atau Kota. Untuk mengetahui potensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Potensi Pertahanan Sipil / Perlindungan Masyarakat Kota Blitar

Kecamatan	Potensi Hansip / Linmas 2009
Sukorejo	191
Kepanjenkidul	201
Sananwetan	209
Posko Kota	100
Kota Blitar	701

Sumber : Badan Kesbang Linmas Kota Blitar Tahun 2010

Pada sisi lain unsur dari aparaturnya yang mempunyai tugas dan fungsi penciptaan ketentraman dan ketertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dimana keberadaannya mengalami perkembangan baik dari sisi Organisasi maupun personilnya. Perkembangan Jumlah Sat Pol PP di Kota Blitar sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.49
Perkembangan Potensi Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Uraian	Jumlah Polisi Pamong Praja				
	2005	2006	2007	2008	2009
Kota Blitar	21	20	16	45	41

Sumber : BKD Kota Blitar Tahun 2010

Dari kondisi potensi pengamanan tersebut diatas membantu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Blitar yang kondusif. Hal ini tercipta tidak lepas dari pola pendekatan yang dilakukan aparat yang berwenang yang lebih mengutamakan aspek persuasif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu kondisi kamtibmas juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

proses penegakan hukum. Hal ini tercermin dari prosentase tindak kejahatan yang dilaporkan dan yang berhasil diselesaikan, seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.50
Perkara kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan
Tahun 2005-2009

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009
A.	Kejahatan yang dilaporkan	175	340	410	326	314
1	Pembunuhan	-	-	1	-	1
2	Perampokan	3	1	2	-	-
3	Pencurian Biasa	45	35	37	36	36
4	Pencurian berat	69	52	51	38	51
5	Lain-lain	58	252	319	252	226
B.	Kejahatan yang diselesaikan	90	202	239	209	243
1	Pembunuhan	-	-	1	-	1
2	Perampokan	2	-	2	-	-
3	Pencurian Biasa	21	21	22	24	25
4	Pencurian berat	31	22	27	25	28
5	Lain-lain	36	159	187	160	189
	Prosentase yang diselesaikan dengan yang dilaporkan	51,4 %	59,4 %	58,29 %	64,1 %	77,38 %

Sumber : Polres Kota Blitar Tahun 2010

Dari tabel diatas diketahui jika tingkat penyelesaian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat ke Polresta Blitar dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan tren peningkatan, jika pada tahun 2007 sebesar 58,29 % maka pada tahun 2009 menjadi 77,38 %.

Semakin tingginya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang ada juga tercermin dari tingkat pelanggaran lalu lintas jalan raya, dimana dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami penurunan angka pelanggaran, bahkan pada tahun 2009 terjadi penurunan yang sangat mencolok, jika pada tahun 2008 angka pelanggaran masih diatas 5000, maka pada tahun 2009 turun drastis menjadi 2.130

pelanggaran. Dari data yang ada diketahui pelanggaran tertinggi adalah pelanggaran yang lebih disebabkan oleh kelalaian masyarakat terhadap keberadaan surat-surat kendaraan. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.51
Pelanggaran Lalu-lintas Jalan Raya Menurut Jenisnya
Tahun 2005-2009

No	Jenis Pelanggaran	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Muatan	783	410	57	13	0
2.	Kecepatan	99	119	7	10	120
3.	Marka	1.251	1.421	1.255	899	405
4.	Surat-surat	3.014	1.345	1.409	2.167	1.028
5.	Perlengkapan	1.590	1.518	1.264	1.183	350
6.	Lain-lain	1.750	1.755	1.459	970	227
	Jumlah	8.487	5.658	5.451	5.242	2.130

Sumber : Polres Kota Blitar Tahun 2010

2.10. Lingkungan Hidup dan Penataan ruang

2.10.1 Kondisi lingkungan hidup

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Blitar dalam pengelolaan lingkungan hidup dari tahun ketahun adalah kecenderungan menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya air dan udara akibat limbah dari kegiatan industri / home industri, permasalahan sampah kota dan semakin berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai akibat pesatnya kegiatan pembangunan.

Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam mengelola dan menangani persoalan limbah selama kurun waktu lima tahun sebelumnya terutama limbah cair dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.52
Program Pengelolaan Limbah Industri dan Rumah Tangga
Kota Blitar Tahun 2005-2009

No	Kegiatan	SASARAN (per tahun)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Program Kali Bersih	6 sungai	6 sungai	6 sungai	6 sungai	6 sungai
3	Uji sampel air sungai	3 sungai 8 titik	-	4 sungai 12 titik	-	2 sungai 7 titik
3	Pengendalian pencemaran limbah tahu /IPAL	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4	Sanimas (IPAL Komunal)	3 unit	4 unit	5 unit	7 unit	10 unit
5	Pengelolaan Limbah RPH	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

Sumber : Kantor LH Kota Blitar

Selain masalah limbah, persoalan lain yang mengancam ketersediaan sumberdaya air adalah pemotongan pohon/hutan kota, kegiatan pertanian yang mengabaikan lingkungan dan berubahnya fungsi daerah-daerah tangkapan air. Guna mendukung program ini, maka upaya yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan penanaman pohon penghijauan disamping sebagai peneduh sekaligus sebagai penghias di sepanjang jalan di Kota Blitar. Masih berhubungan dengan program pelestarian lingkungan hidup, persoalan sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagi sebuah kota, seperti Kota Blitar sampah merupakan persoalan yang tiada habisnya dan setiap tahun selalu bertambah baik secara kuantatif dan kualitas. Volume sampah yang dihasilkan penduduk Kota Blitar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Beban Sampah Kota Blitar Tahun 2009

No	Uraian	Satuan	2009
1.	TPA. Sampah	Lokasi	1
2.	Ditimbun	m ³ / tahun	121.910 m ³ / tahun
3.	Diangkut petugas	m ³ / tahun	79.570 m ³ / tahun
4.	Dibuang ke sungai	m ³ / tahun	121,91 m ³ / tahun
5.	Lainnya	m ³ / tahun	12.069,1 m ³ / tahun

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Blitar

Dari tabel di atas terlihat bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Blitar dari tahun ke tahun semakin meningkat yang tentunya membutuhkan lahan TPA sampah yang semakin luas pula. Sistem penanganan sampah di TPA selama ini dilakukan dengan menggunakan sistem *control landfill* yaitu pembuangan sampah dengan pengurugan tanah. Untuk mengurangi bau sampah dan kemungkinan timbulnya penyakit/gangguan pada masyarakat, juga dilengkapi dengan mesin *incenterator*, yang selanjutnya dilakukan pengolahan sampah secara tuntas dengan menggunakan teknologi tepat guna (TTG).

Sedangkan untuk menampung sementara sampah tersebut, fasilitas yang tersedia ada 28 kontainer sampah, transfer depo 10 buah, gerobak sampah 95 buah, tong sampah 209 buah. Lebih lanjut, untuk mengetahui fasilitas pengelolaan sampah yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Kota Blitar Tahun 2007-2009

No	Fasilitas Yang Tersedia	Jumlah		
		2007	2008	2009
1.	Tranfer Depo	5	5	6
2.	Kontainer Sampah	25	25	27
3.	Bulldoser	1	1	1
4.	Truk Pengangkut Sampah	4	4	4
5.	Gerobak Sampah	4	4	10
6.	Tong Sampah	150	150	275

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Blitar

2.10.2 Tata ruang daerah

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara fisik dan nonfisik perkotaan termasuk menjamin daya dukung lingkungan, sehingga Kota Blitar tetap menjadi daerah yang nyaman maka kebijakan yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan taman dan hutan kota yang mampu membantu memperindah wajah kota dan memperbaiki kualitas udara.
2. Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.
3. Perbaikan dan peningkatan kapasitas bangunan air dalam rangka mengatasi banjir dan tanah longsor di daerah aliran sungai dengan plengsengan.
4. Perbandingan prosentase penggunaan lahan di Kota Blitar antara lahan terbangun dan lahan tak terbangun adalah 46,19 : 53,81.
Lahan terbangun didominasi oleh penggunaan lahan untuk

kawasan permukiman sebesar 36,17 % dari keseluruhan luas Kota Blitar. Sedangkan untuk lahan tak terbangun didominasi oleh penggunaan lahan untuk kawasan pertanian sebesar 39% dari keseluruhan luas Kota Blitar. Pola pemanfaatan ruang di Kota Blitar diarahkan pada prinsip penyesuaian secara bertahap tanpa harus melakukan perubahan secara frontal terhadap dokumen perencanaan yang telah ada sampai dengan batas waktu evaluasi sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Secara terperinci penggunaan lahan di Kota Blitar tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55.
Penggunaan Tanah di Kota Blitar Tahun 2009

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2009	
		Luas	Prosentase (%)
1	TPA	1.213	0.04
2	Terminal	2.72	0.08
3	Sungai	4.02	0.12
4	Stasiun KA	4.85	0.15
5	Sawah Irigasi	1270.62	39.00
6	Ruang Terbuka Hijau	30.35	0.93
7	Permukiman	1178.23	36.17
8	Perkantoran	44.77	1.37
9	Peribadatan	4.51	0.14
10	Perdagangan dan Jasa	54.11	1.66
11	Pendidikan	58.77	1.80
12	Pariwisata	9.23	0.28
13	Makam	22.35	0.69
14	Kesehatan	126.15	3.87
15	Kebun kering dengan berbagai jenis tanaman	405.41	12.44
16	Kawasan militer	20.07	0.62
17	Industri dan pergudangan	20.46	0.63
Jumlah		3257.833	100

Sumber : RTRW Kota Blitar Tahun 2008 – 2028

Sementara yang menjadi sasaran dari pengembangan dan pemanfaatan ruang di Kota Blitar diprioritaskan kepada 7 bidang pengembangan yaitu:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Pengembangan Permukiman
3. Pengembangan ekonomi daerah
4. Pengembangan kawasan wisata
5. Pengembangan Fasilitas Pelayanan
6. Pengembangan Jaringan jalan
7. Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan

2.11. Penerapan Otonomi Daerah

Seiring berkembangnya dinamika pembangunan dan tuntutan untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tantangan jaman dan dinamika masyarakat yang terus berkembang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi agar terwujud birokrasi yang bersih dan berwibawa sesuai indikator Tata Pemerintahan yang baik, antara lain akuntabel, transparan dan partisipatif. Langkah yang diambil Pemerintah Kota Blitar antara lain :

1. Penataan perangkat daerah yang ramping struktur dan kaya fungsi;
2. Desentralisasi kewenangan kepala daerah kepada Camat dan Lurah;
3. Memberlakukan desentralisasi anggaran sampai ke unit kerja terkecil sebagai entitas akuntansi;
4. Komunikasi politik khususnya antara DPRD dengan Pemerintah Kota Blitar menunjukkan arah yang positif dalam membangun "*networking*" sebagai mitra kerja;

5. Menerapkan model pelayanan perijinan satu pintu yang mengarah pada konsep pelayanan one stop servis;
6. Membangun sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang secara optimal;
7. Memiliki konsep kebijakan pembangunan Kota;
8. Terlembaganya pemberdayaan masyarakat yang salah satunya terwujud dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

Dari langkah yang diambil tersebut untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat pada uraian berikut ini.

2.11.1 Produk Hukum Daerah

Agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik maka diperlukan regulasi yang mengatur dan memayungi implementasi di lapangan. Selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 telah dibuat berbagai aturan seperti Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan produk hukum lainnya. Sebagian besar peraturan tersebut merupakan aturan baru dan sebagian yang lain merupakan peraturan perubahan dari peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Untuk mengetahui perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56.
Penetapan Keputusan Dan Intruksi WaliKota Blitar
Tahun 2005-2009

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Perda	6	5	10	20	16
2	Keputusan Walikota yang bersifat mengatur	52	34	31	62	33
3	Keputusan Walikota bersifat menetapkan	658	712	589	739	829
4	Instruksi Walikota	3	-	-	-	-
J U M L A H		719	751	630	821	878

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Blitar Tahun 2010

2.11.2 Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2005-2009 secara umum telah memenuhi aturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diupayakan mempunyai bentuk yang ramping namun fungsinya lebih banyak. Untuk mengetahui perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.57.
Perkembangan Kelembagaan Pemerintah Kota Blitar
Tahun 2005-2009

NO	Jenis Lembaga	2005	2006	2007	2008	2009
1	Sekretariat Daerah	1	1	1	1	1
2	Staf Ahli Walikota	1	-	-	-	-
3	Sekretariat DPRD	1	1	1	1	1
4	Badan	5	5	6	4	4
5	Inspektorat Daerah	-	-	-	1	1
6	Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
7	Dinas	12	12	12	12	12
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	1	1
9	Kantor	3	3	4	5	5
10	Kecamatan	3	3	3	3	3
11	Kelurahan	20	20	20	21	21
J U M L A H						

Sumber : BKD Tahun 2010 yang diolah

2.11.3 Kondisi Aparatur Daerah

Tujuan agar terwujudnya pegawai Pemerintah Kota Blitar yang profesional yaitu mampu melaksanakan tugas yang didukung pengetahuan, ketrampilan dan keahlian. Untuk mengetahui sumberdaya Aparatur disisi pendidikan akhir nya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58.
Perkembangan Tingkat Pendidikan PNS
Tahun 2005-2009

NO	Pendidikan terakhir	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD	133	93	97	127	122
2	SLTP	114	144	177	192	190
3	SLTA	706	710	883	1001	1022
4	D1-D3	2301	2611	845	804	898
5	S1 / D4			1725	1744	1869
6	S2			103	104	114
7	S3	-	-	-	-	-
J U M L A H		3.217	3558	3830	3972	4215

Sumber : BKD Tahun 2010 yang diolah

Catatan : Tahun 2005-2006 D1 s/d S3 digabung

Secara umum terlihat bahwa sampai dengan akhir tahun 2009 sebagian besar Aparatur di Kota Blitar berpendidikan diatas SLTA atau sebesar 68,5 %, dari yang berpendidikan Diatas SLTA 64,87 % adalah lulusan D-4 dan Sarjana. Disamping pendidikan formal untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai maka salah satu usaha yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan bagi PNS Pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga atau instansi negeri atau swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional maupun Asing.

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pendidikan dan Latihan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.59.
Diklat Pegawai Pemerintah Kota Blitar
Tahun 2005 - 2009

No	Jenis Diklat	Peserta Tahun 2005 (orang)	Peserta Tahun 2006 (orang)	Peserta Tahun 2007 (orang)	Peserta Tahun 2008 (orang)	Peserta Tahun 2009 (orang)
1.	Diklat Kepemimpinan					
	Diklat Pim Tk. II	2	-	3	2	2
	Diklat Pim Tk. III	6	5	11	12	13
	Diklat Pim Tk. IV	40	-	-	40	40
	LPJ	-	147	278	368	246
2.	Diklat Teknis dan Fungsional					
	Broadcasting	-	-	25	-	-
	Barang dan Jasa	40	59	68	65	65
	Tata Usaha Keuangan	-	-	62	-	-
	Orientasi CPNS	-	-	368	233	372
	Pemantapan Tugas Camat dan Lurah	-	50	-	48	-
	SIK	-	-	-	30	-
	Bimtek Sistem Administrasi Pemerintah dan Reviu Laporan Keuangan Daerah	-	-	25	-	-
	KTI	-	-	-	30	-
	Diklat Quantum Teaching Bagi Guru	-	-	-	30	-
	Penilaian Angka Kredit Kesehatan	-	-	-	30	-
	Pemantapan Tugas Sekretaris	-	-	-	30	-
	Penyusunan Suplemen LPPD	-	-	-	-	81
	Diklat Teknis Perpustakaan	29	-	-	-	-
	Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli	30	-	-	-	-
	Pelatihan Penanggulangan Bencana Satuan Trantib dan Linmas	60	-	-	-	-
	Pengiriman PNS mengikuti diklat Teknis dan Fungsional (JFA, Analisis Jabatan, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Usaha Daerah, Advokasi Jabatan Fungsional, Keuangan Daerah, Promosi dan Pemasaran Pariwisata, dll	79	93	100	83	85

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar, 2010

Dilihat dari tabel di atas maka terdapat dua jenis pendidikan dan pelatihan yaitu diklat struktural dan diklat teknis fungsional yang dilaksanakan hampir diseluruh sektor bidang layanan masyarakat.. Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memenuhi kompetensi jabatan setiap pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, sedangkan diklat teknis dan fungsional bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis yang wajib dikuasai oleh pegawai fungsional umum maupun fungsional khusus.

Peningkatan kualitas pegawai selain melalui pendidikan non-formal juga melalui pendidikan formal. Wujud dari kegiatan ini yaitu pengiriman PNS Pemerintah Kota Blitar untuk mengikuti tugas belajar dan pemberian ijin belajar bagi PNS Pemerintah Kota Blitar. Tugas belajar diberikan kepada PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan meninggalkan tugas kedinasan sedangkan ijin belajar diberikan kepada PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan tugas kedinasan. Jumlah Aparatur yang mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar selama 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60.
Perkembangan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Aparat
Pemerintah Kota Blitar 2005-2009

No	Tingkat Pendidikan	Status Pendidikan									
		IB (Jumlah/Tahun)					TB (Jumlah/Tahun)				
		2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
1	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTA/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DIPLOMA I-IV	18	6	12	5	1	2	1	-	6	1
4	S-1	38	30	54	182	85	1	-	-	-	-
5	S-2	6	14	17	7	35	-	-	5	-	10
6	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1
JUMLAH		62	50	73	194	121	4	1	7	10	12

Sumber : BKD Kota Blitar, 2010

Berdasarkan tabel di atas maka terdapat trend naik untuk peserta Tugas Belajar di Tahun 2009 untuk jenjang pendidikan S-2 dikarenakan adanya penawaran beasiswa dari Departemen Pendidikan Nasional bagi pengajar di sekolah bertaraf internasional, sedangkan tugas belajar dokter spesialis yang dilaksanakan sejak Tahun 2005

sapai dengan 2009 guna mencukupi kebutuhan pegawai Pemerintah Kota Blitar dibidang kesehatan. Sedangkan PNS yang mengajukan ijin belajar memiliki trend naik untuk jenjang S-1 dan S-2 karena kebanyakan dari peserta tersebut berasal dari guru atau pengajar, hal ini disebabkan adanya aturan terkait sertifikasi bagi tenaga pengajar dan syarat minimal pendidikan bagi tenaga pengajar yaitu S-1.

Jika kita bandingkan maka jumlah peserta TB lebih sedikit dibandingkan peserta IB. Hal ini dikarenakan peserta TB dalam pelaksanaannya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Blitar sehingga besar kecilnya jumlah peserta TB tergantung kekuatan APBD dalam melaksanakan TB, sedangkan dalam pelaksanaan IB dibiayai secara mandiri tanpa ada bantuan dari Pemerintah Kota Blitar.

Disisi lain untuk meningkatkan kualitas Aparatur dengan meningkatkan pendidikannya baik formal maupun non formal, maka bagi Aparatur yang melanggar aturan Disiplin kepegawaian adalah dengan memberikan sangsi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Untuk mengetahui jumlah Aparatur yang telah diberikan sangsi selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.61.
Perbandingan Jumlah Pelanggaran Disiplin PNS
Pemerintah Kota Blitar Tahun 2005 - 2009

No	Jenis Pelanggaran Disiplin	Jumlah (Per Tahun)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pelanggaran PP 30/1980	2	4	2	3	5
2.	Pelanggaran PP 45/1990	-	-	2	1	2
3.	Pelanggaran PP 32/1979	5	3	-	3	-
	Jumlah	7	7	4	7	7

Sumber : BKD Kota Blitar, 2010

2.11.4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Salah satu komponen yang menunjang dalam pembiayaan Anggaran daerah adalah kepemilikan Aset daerah, semakin besar asset yang dimiliki maka akan semakin besar pula modal yang dipunyai daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk melihat perkembangan jumlah dan nilai Barang Daerah tersebut selama tahun 2008-2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.62.
Perkembangan Barang Daerah Kota Blitar Tahun 2008-2009

No	Tahun	Jumlah Barang	Nilai barang
4.	2008	394.796	1.799.799.017.467,45
5.	2009	420.090	1.928.668.019.846,41

Sumber : Bagian Perlengkapan Setda Kota Blitar tahun 2010

Berdasarkan uraian tabel tersebut, terlihat bahwa secara fisik berdasarkan jumlah barang sebagai aset daerah maupun nilainya dari tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan. Dengan jumlah barang mencapai 394.796 unit pada tahun 2008, naik menjadi 420.090 unit pada akhir tahun 2009, sedangkan nilai barangnya mengalami kenaikan 7.16 % atau sekitar Rp. 128.869.002.378,96.

2.11.4 Pelayanan prima Pemerintahan

Untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, pemerintah Kota Blitar melakukan berbagai upaya terobosan baik dari sisi SDM, lembaga, prosedur, manajemen maupun prasarananya, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pemantapkan penerapan sistem pelayanan perijinan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar dengan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT);
2. Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Masyarakat dengan pendekatan sistem *Citizen Charter* (terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan pemerintahan)
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pemerintahan yang dititikberatkan kepada fungsi kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat antara lain:
 - Kegiatan pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan dalam bentuk *one room service* dengan membangun/menyiapkan satu ruangan khusus pelayanan. Pelayanan yang didukung oleh program jaringan komputerisasi yang dapat diakses dari seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Blitar.
 - Pembinaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan yang baik kepada masyarakat
 - Peningkatan tertib administrasi Kependudukan Kecamatan dan Kelurahan
 - Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan e-Government.
4. Pengembangan informasi dan komunikasi publik dengan melakukan optimalisasi Pengolahan Data dan Informasi publik melalui penerapan *e-government* pada SKPD melalui jaringan internet dan intranet;

5. Terbangunnya sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang.
6. Adanya sinkronisasi, integrasi dan simplikasi konsep pelayanan prima yang dilaksanakan seluruh instansi Pemerintah Kota Blitar;
7. Peningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan debirokratisasi dan deregulasi pelayanan masyarakat yang didukung adanya perubahan pola pikir dari aparat pemerintahan;
8. Keberadaan unit pengaduan masyarakat (ULPIM) untuk mengelola keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Upaya yang telah dilaksanakan tersebut telah menghasilkan proses pelayanan masyarakat yang lebih cepat, murah dan sesuai dengan aturan dengan hasil sesuai data pada kantor Pelayanan terpadu sebagai berikut :

Tabel 2.63.
Jumlah Pemohon Perijinan Pada KPT Tahun 2008-2009

No.	Macam perijinan	Tahun 2008		Tahun 2009	
		Jml	JmlRetribusi (Rp)	Jml	JmlRetribusi (Rp)
1.	Ijin prinsip	32	0	44	0
2.	Ijin tempat usaha/HO	284	6.167.450,00	288	5.699.000,00
3.	Ijin mendirikan bangunan	842	100.826.545,99	1.032	237.503.955,75
4.	Ijin pemasangan reklame	1.108	212.685.750,00	1.071	211.409.000,00
5.	Ijin pemakaian gedung	81	38.950.000,00	89	48.650.000,00
6.	Ijin pemakaian kekayaan drh	204	19.089.500,00	580	21.298.500,00
7.	Ijin pemakaian tempat rekreasi dan olah raga	993	119.991.500,00	1.268	118.620.000,00
8.	Ijin pemakaian kios di pasar	0	-	0	-
9.	Ijin pemakaian toko, kios, bedak, warung non pasar	2	-	0	-
10.	Ijin trayek	55	1.296.000,00	55	1.242.000,00
Jumlah		3.355	479.917.245,99	4.427	595.772.455,75

Sumber : KPT Kota Blitar, 2010

Sedangkan perkembangan penerbitan TDP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64
Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan Kota Blitar 2006-2009

Jenis Perusahaan	Jumlah (Pe-r-Tahun)			
	2006	2007	2008	2009
PT	18	10	8	11
KOPERASI	7	8	3	3
CV	48	70	78	55
FIRMA / UD	0	0	0	0
PERORANGAN	184	164	139	172
LAINNYA	0	1	1	0
JUMLAH	257	253	229	241

Sumber : Dinas Perindustrian Daerah Kota Blitar Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya dilakukan penerbitan TDP baik untuk registrasi / perpanjangan atau pendaftaran baru. Hal ini karena masa berlakunya TDP tidak sama, sehingga setiap tahun perkembangannya tidak sama.

Data dan informasi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya adalah data yang terkait kondisi umum di Kota Blitar ditinjau dari berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya data tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan isu-isu strategis yang terjadi di Kota Blitar, sekaligus sebagai bahan analisa dan prediksi serta sebagai titik awal dalam perencanaan lima tahun kedepan.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 23 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran atas kondisi pengelolaan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Selain itu juga memberikan gambaran atas kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak dibayar kembali oleh daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Komponen Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah dana yang diterima oleh pemerintah daerah tergantung formulasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan kondisi daerah yang bersangkutan. Kondisi daerah dimaksudkan diantaranya keberadaan program-program unggulan yang diajukan kepada pemerintah pusat untuk dibiayai dari DAK.

Lain-lain pendapatan daerah yang syah komponennya terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya serta dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan sangat tergantung dari upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah baik melalui bantuan keuangan maupun hibah.

Pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar dalam kurun waktu 2006-2010 perkembangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Blitar
Tahun 2006-2009

Jenis pendapatan	2006	2007	2008	2009	2010
PAD	27.453.235.798,44	26.721.888.388,41	40.794.908.395,66	35.856.147.824,65	46.856.490.224,00
Dana Perimbangan	220.713.686.889,78	242.935.871.148,56	276.119.439.445,00	289.517.953.129,00	272.336.366.612,00
Lain-lain Pendapatan Yang Syah	66.369.082,00	18.200.322.615,00	32.109.315.945,98	62.134.604.947,00	79.209.551.178,00
Jumlah	248.233.291.770,22	287.858.082.151,97	349.023.663.786,64	387.508.705.900,65	398.402.408.014,00

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Sumbangan terbesar dari Dana Perimbangan kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah. Komposisi ini memberikan gambaran bahwa dari sisi anggaran Pemerintah Kota Blitar masih tergantung kepada pemerintah pusat. Namun yang mengembirakan adalah adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan yang diperoleh melalui berbagai upaya baik dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah maupun lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah. Melalui langkah intensifikasi yang dilakukan secara kreatif dan inovatif, pendapatan asli daerah ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, dan sedapat mungkin tidak menambah beban masyarakat terutama dari masyarakat berpenghasilan rendah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan kecenderungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan hibah, bantuan keuangan, program percepatan pembangunan serta intensifikasi kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam penggalan bagi hasil pajak dari propinsi terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pendapatan daerah yang diperoleh dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan. Perkembangan kondisi belanja daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun 2006 sampai 2010 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Perkembangan APBD Kota Blitar
Tahun 2006 -2010

Jenis Belanja	2006	2007	2008	2009	2010
Belanja Operasi	182.223.089.465,57	213.890.493.221,00	250.634.803.485,60	275.662.685.136,89	330.913.281.917,49
Belanja Modal	59.257.967.912	84.469.836.875,50	104.997.742.005,30	111.495.557.389,96	81.994.075.246,00
Belanja Tak terduga	1.211.602.042	640.466.600,00	281.108.950,00	253.450.000,00	350.000.000,00
Jumlah	242.692.659.419,57	299.000.796.696,50	355.913.654.440,90	387.411.692.526,85	413.257.357.163,49

Tabel di atas menunjukkan bahwa maka belanja daerah mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan pendapatan daerah. Belanja daerah dengan pendapatan daerah dilakukan secara seimbang. Komposisi belanja terbesar setiap tahunnya adalah belanja operasi, kemudian belanja modal

dan terakhir belanja tak terduga. Belanja operasi komponen utamanya mencakup belanja gaji pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja barang dan jasa. Kemudian belanja modal merupakan belanja untuk peningkatan dan penambahan aset pemerintah daerah berupa pengadaan mesin peralatan, gedung dan bangunan, tanah maupun aset lainnya. Belanja operasi termasuk belanja yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat seperti peningkatan ketrampilan (skill) masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun yang langsung ditangani oleh masyarakat melalui belanja hibah atau bantuan sosial.

Pengelolaan pembiayaan terdiri dari pengelolaan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri atas komponen SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan pengelolaan pembiayaan Pemerintah Kota Blitar dalam Tahun 2006-2010 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.
Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kota Blitar
Tahun 2006 -2010

Jenis Pembiayaan Daerah	2006	2007	2008	2009	2010
Penerimaan Pembiayaan	24.381.266.974,06	28.919.539.211,71	17.385.224.455,18	11.531.444.398,92	15.529.456.149,49
SILPA	24.381.266.974,06	28.919.539.211,71	17.370.224.455,18	10.034.280.398,92	15.529.456.149,49
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			15.000.000,00	1.300.000.000,00	
Penerimaan Piutang Daerah				197.164.000	
Pengeluaran Pemiayaan	1.002.360.113,00	276.792.382	460.953.402,00	109.641.250	674.507.000,00
Penyertaan Modal Pemda	700.000.000		209.728.750		250.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang	302.360.113	276.792.382	251.224.652	109.641.250	424.507.000,00

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan pembiayaan terbesar diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA), sedangkan pada 2008 dan 2009 juga diperoleh dari penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah. SILPA berasal dari dana kegiatan pembangunan yang tidak terserap 100%. Hal ini dapat disebabkan karena adanya efisiensi anggaran kegiatan pembangunan. Tetapi SILPA semakin menurun juga dapat memberikan indikasi bahwa program dan kegiatan semakin tercapai.

Pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk membayar pokok hutang kepada pemerintah yaitu hutang pembangunan Terminal Patria pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dan pembayaran hutang PDAM pada tahun 2009 dan 2010. Selain itu pengeluaran pembiayaan dapat berupa untuk penyertaan modal seperti pemberian modal untuk lembaga koperasi. Pemberian modal ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan usaha dan kegiatan koperasi baik koperasi pada umumnya maupun koperasi wanita. Upaya ini dilakukan sebagai implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar yang berpihak pada pengembangan

ekonomi berbasis kerakyatan dan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menggambarkan berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam mencapai target pendapatan serta potensi sumber pendapatan lain yang dapat diperoleh. Sumber pendanaan dapat berasal dari PAD, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, sumber pendapatan lainnya yang syah dan dapat juga bersumber dari pihak ketiga.

Perkembangan pendapatan ke depan diprediksikan naik secara signifikan karena adanya peningkatan dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga berasal dari kosekuensi pengimplementasian Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan kepada pemerintah daerah paling lambat tahun 2014. Jenis pajak lain yang akan dilimpahkan adalah Pajak Penghasilan atas Pengalihan Tanah dan Bangunan (PPhTB) dan pajak / retribusi daerah tentang air bawah tanah. Selain itu peraturan perundangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga memberikan arahan untuk meninjau kembali berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar disesuaikan dengan ketentuan yang baru. Oleh karena itu peluang ini sangat tergantung dari kinerja birokrasi dalam menangkap berbagai inovasi dan kreasi atas berbagai potensi sumber pendapatan untuk dikelola secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Posisi strategis dari kerangka pendanaan adalah sebagai upaya untuk menjamin agar seluruh rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 agar dapat tercapai. Prediksi pendapatan daerah menjadi dasar dalam rencana pendanaan program pembangunan. Dan juga perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuka peluang dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pendanaan program pembangunan. Berdasarkan kondisi pendapatan daerah dan kondisi eksternal yang mempengaruhi, prediksi pendapatan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Prediksi Pendapatan Daerah Kota Blitar
Tahun 2011 - 2015

Jenis pendapatan	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	49.554.955.323,00	51.378.168.124,90	53.292.541.566,85	60.756.812.734,84	63.140.118.407,18
Dana Perimbangan	278.599.860.893,00	290.357.983.755,50	302.704.012.761,13	310.213.164.163,03	324.245.222.539,18
Lain-lain Pendapatan Yang Syah	56.970.902.839,00	59.463.814.697,70	63.622.842.154,53	67.849.150.539,88	72.146.103.900,16
Jumlah	385.125.719.055,00	401.199.966.578,10	419.619.396.482,51	438.819.127.437,75	459.531.444.846,53

Selain sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku pemerintah daerah dapat menggali dari Pihak Ketiga berupa pinjaman / hutang, hibah, sharing program, bantuan dan atau *Cooperate Sosial Responsibility*. Peluang untuk berkerja sama dengan Pihak Ketiga terbuka secara luas karena posisi Kota Blitar yang sudah dikenal dan dipercaya oleh berbagai pihak / donor dalam berbagai program maupun kegiatan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal

4.1.1. Kondisi Internal

a. Potensi Yang Dimiliki (*Kekuatan*)

1. Luas wilayah Kota Blitar 32,578 km² terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sananwetan. Jumlah penduduk pada akhir tahun 2009 adalah 139.457 jiwa, dengan kepadatan penduduk 4.281,78 jiwa/km².
2. Infrastruktur pendukung Kota Blitar sebagai pusat perdagangan barang dan jasa bagi masyarakat dari Kabupaten sekitarnya cukup memadai.
3. Kota Blitar memiliki objek-objek wisata khususnya wisata sejarah sangat potensial untuk dikembangkan.
4. Hubungan eksekutif dengan DPRD berada dalam suasana yang kondusif, dalam arti segala tugas-tugas pemerintahan daerah telah dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebijakan pemerintah Kota Blitar untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pengembangan ekonomi lokal yang ditandai dengan menjamurnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Timur (tahun 2009 sebesar 77,12).

6. Meningkatnya usia harapan hidup penduduk Kota Blitar pada tahun 2009 sebesar 72,10 dan merupakan angka tertinggi di Jawa Timur memberikan harapan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Blitar khususnya dibidang pelayanan kesehatan.
7. Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar yang berlangsung secara tertib, aman dan damai telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap situasi politik dan keamanan daerah.
8. Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mencapai 6,21% pada tahun 2009 dengan kontribusi PDRB terbesar berasal dari sektor tersier (69,03%).

b. Kendala Internal (*Kelemahan*)

1. Belum mantapnya pelaksanaan sistem pariwisata terpadu yang berorientasi kawasan menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata Kota Blitar.
2. Belum optimalnya pemerataan dan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kota Blitar terutama keluarga miskin.
3. Kondisi wilayah Kota Blitar sebagian besar daerah permukiman dan lahan pertanian, sehingga ditinjau dari segi kuantitas luas wilayah dan kualitas kandungan kekayaan alam sangat terbatas.
4. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar.
5. Semakin menurunnya apresiasi generasi muda terhadap nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat globalisasi budaya.

6. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan di Kota Blitar akibat pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kebutuhan perumahan dan permukiman di Kota Blitar ditandai dengan semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (*green space*).
7. Belum mantapnya penyelenggaraan *Good Governance* (tata pengelolaan pemerintahan yang baik) dalam penerapan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

4.2. Kondisi Eksternal

a. Peluang

1. Situasi perekonomian nasional yang semakin stabil ditandai dengan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serta semaraknya perdagangan saham di bursa saham nasional akan memberikan harapan optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, regional maupun lokal.
2. Semakin menjamurnya lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan budaya daerah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya pelestarian budaya lokal (*local culture*) semakin meningkat.
3. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat sehingga arus informasi menjadi semakin cepat dan tak terbatas oleh ruang dan waktu memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki.
4. Menguatnya tuntutan penyelenggaraan prinsip *Good and Democratic Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota

Blitar

b. Tantangan

1. Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil bisa membawa dampak pada perkembangan perekonomian Kota Blitar.
2. Ketidakkonsistenan aturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
3. Semakin berkembangnya peritel dan waralaba sebagai pesaing bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Diterapkannya kawasan perdagangan bebas China Asian Free Trade Area (CAFTA) mulai tahun 2010. Dengan demikian akan semakin banyaknya produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, tak terkecuali ke Kota Blitar dan menjadi pesaing bagi produk lokal.
5. Masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal.
6. Tumbuhnya pusat-pusat perdagangan di sekitar Kota Blitar, terutama makin berkembangnya pusat-pusat perdagangan di koridor Blitar-Kanigoro sebagai konsekuensi logis perpindahan ibukota Kabupaten Blitar.

4.3. ISU-ISU STRATEGIS

Serangkaian isu kekinian yang mempunyai hubungan erat dan atau pengaruh langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kota Blitar yang telah dicanangkan adalah

1. Bidang Pemerintahan

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan kunci bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat secara prima. Reformasi birokrasi secara terus menerus mengembangkan ruang bagi peningkatan profesionalisme aparat

serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pemberdayaan (*empowerment*) terhadap *stakeholders* / pilar tatakelola pemerintah yang baik diperlukan dalam rangka kemandirian, otonomi, keswadayaan serta berjalan mekanisme kewenangan dan kontrol secara berimbang (*check and balance*).

2. Bidang Pendidikan

Pembangunan berupaya menjadikan manusia sebagai obyek dan subyek pembangunan melalui peningkatan kualitas nilai-nilai kemanusiaan. Kualitas sumberdaya manusia merupakan penggerak utama pembangunan yang berorientasi kepada rakyat. Peranan pendidikan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak dapat tidak berfungsi sebagai kunci utama dalam upaya untuk peningkatan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta budi pekerti masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan yang layak merupakan hak bagi semua warga masyarakat, oleh karena itu partisipasi, peluang dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Agar pendidikan dapat terselenggara secara adil dan merata serta berkesinambungan dan berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih baik terutama bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu diperlukan adanya subsidi anggaran terutama dari pemerintah maupun masyarakat yang mampu. Demikian pula tuntutan dunia pendidikan mulai bergeser dari keterjangkauan pelayanan menjadi kualitas pelayanan pendidikan.

3. Bidang Kesehatan

Sumberdaya manusia yang sehat merupakan modal dasar bagi terselenggaranya pembangunan. Kualitas kesehatan masyarakat dan

lingkungan akan mendorong pertumbuhan dan produktifitas masyarakat. Masyarakat sehat adalah masyarakat yang memiliki daya adaptasi, daya tahan, kuat dan produktif. Oleh karena itu kesehatan merupakan hak dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterjangkauan layanan kesehatan (aksesibilitas) telah bergeser pada kualitas pelayanan kesehatan baik kecepatan / daya tanggap, ketepatan, serta akurasi pelayanan kesehatan .

4. Bidang Ekonomi

Kota Blitar yang memiliki keterbatasan sumberdaya alam telah mendorong tumbuh dan kembangnya ekonomi yang berbasis kepada kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki ciri-ciri lebih dekat kepada kegiatan berskala kecil, menengah, sektor informal serta lebih mengandalkan kepada potensi lokal. Ekonomi kerakyatan telah teruji dalam menghadapi berbagai macam krisis dan tantangan ekonomi baik dalam skala regional, nasional maupun internasional. Keterujian ekonomi kerakyatan telah memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi katup penyelamat perekonomian daerah. Dalam perkembangannya ekonomi kerakyatan memerlukan proteksi / perlindungan, peningkatan kemampuan / skill, jaringan kerja maupun subsidi modal / jaminan (agunan) modal baik dari pemerintah maupun dunia usaha.

5. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan sebagai salah satu komponen utama dalam pencapaian pembangunan milenium (millenium development goals) mengharuskan pemerintah Kota Blitar untuk secara sungguh-sungguh menuntaskan permasalahan kemiskinan sampai dengan 5% pada akhir

tahun 2015. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 13% pada tahun 2006 menjadi 9,89% pada tahun 2009.

Agar penanggulangan kemiskinan dapat berhasil baik perlu adanya optimalisasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar lembaga, program dan kegiatan. Penanganan kemiskinan tidak hanya berbentuk bantuan langsung (*carity*) tetapi juga bantuan bersifat pemberdayaan ekonomi produktif dan peningkatan kapasitas. Penanggulangan kemiskinan kedepan diarahkan agar masyarakat miskin mampu berdiri sendiri sesuai dengan karakteristiknya.

6. Bidang Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup dewasa ini menghadapi tantangan yang cukup serius, baik karena pengaruh perubahan iklim, aktivitas ekonomi maupun pola hidup manusia. Disamping itu tuntutan akan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), ketersediaan ruang terbuka hijau, ketersediaan sanitasi yang baik serta keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Yang kesemuanya diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

7. Wawasan kebangsaan dan religiusitas

Globalisasi mengarah kepada dialog dan persaingan antar ideologi yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme bangsa termasuk Indonesia. Kesadaran akan satu kesatuan masyarakat, bangsa dan negara, cita-cita serta kebhinekaan dalam era global sekarang ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu jati diri bangsa dengan nilai-nilai wawasan

kebangsaan sebagai roh utamanya perlu selalu dipupuk dan dibina. Selain itu perlu didasari pemahaman akan kearifan lokal yang kuat. Kearifan lokal merupakan salah satu pilar bagi terbentuknya wawasan kebangsaan. Nasionalisme dan kearifan lokal akan menjadi sebuah dorongan yang kuat apabila didukung oleh penguataan atas nilai-nilai keagamaan. Pengamalan agam secara utuh akan mampu mengikis radikalisme, terorisme dan chauvinisme. Kota Blitar dengan ciri khusus yang dimiliki diharapkan menjadi salah satu daerah yang mampu memompakan semangat untuk kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Kota Blitar Tahun 2011-2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumberdaya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka visi Kota Blitar ditetapkan sebagai berikut :

**“MENUJU MASYARAKAT KOTA BLITAR SEJAHTERA YANG
BERKEADILAN, BERWAWASAN KEBANGSAAN, DAN RELIGIUS
MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2015”**

Adapun makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- ***Sejahtera yang Berkeadilan*** yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat, yang kesemuanya harus bisa dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
- ***Wawasan Kebangsaan*** mengandung maksud agar proses pembangunan yang dilaksanakan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

juga membangun karakter masyarakat kota Blitar untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini dan mencintai nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya

- **Religius** adalah kondisi masyarakat yang menjunjung norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama sebagai landasan moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- **APBD Pro Rakyat** mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

5.2. Misi Kota Blitar Tahun 2011-2015

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atas dasar makna misi dimaksud serta berlandaskan kepada makna visi Kota yang telah ditetapkan, Misi Kota Blitar periode 2011 – 2015 sebagai berikut :

- 1) **Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa** mengandung makna bahwa keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme, dan kearifan lokal.

2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan

pendidikan pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar serta berkeadilan sehingga akan tercapai tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat.

3) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata

pada hakekatnya pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan sehingga bisa diakses seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar secara adil untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4) Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis

kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan, mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama dibidang pariwisata, perdagangan dan jasa serta harus berpihak kepada masyarakat menengah dan miskin dengan menitikberatkan kearah perluasan akses ekonomi bagi masyarakat dan pengembangan sektor koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya mampu menurunkan angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai aspek untuk semakin meningkatkan keberdayaan dan kemandirian keluarga miskin yang dalam

pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik program maupun pelakunya serta melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha termasuk masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

5) Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah, berarti bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat didalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang didukung oleh aparatur profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk memberikan pedoman kepada seluruh aspek penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kota Blitar agar bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan selama kurun waktu Lima tahun kedepan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai pengendali pencapaian keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Blitar dan diukur berdasarkan indikator sasaran yang SMART (*Specific, measurable, attainable, realistic, timely*) yang berarti spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Blitar periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Berketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.1. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Dan Jati Diri Masyarakat Kota Blitar	1.1.1. Meningkatnya semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal	Prosentase kesadaran masyarakat terhadap simbol negara (%)	75
		Peningkatan Jumlah Kader Bela Negara (%)	50
		Peningkatan Jumlah grup kesenian Aktif (%)	50
		Peningkatan jumlah even budaya/atraksi seni budaya (%)	50
1.2. Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	1.2.1. Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sarana ibadah dibanding penduduk	1:400
		Rasio lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur'an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain	100
		Tingkat kerukunan hidup internal dan antar umat beragama (%)	100
	1.2.2. Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Norma Sosial	Penurunan angka pelanggaran hukum (%)	10
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran hukum (%)	85
		Penurunan angka kriminalitas (%)	20

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan keterjangkauan Pelayanan Pendidikan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
2.1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	2.1.1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Rata rata jumlah murid jenjang SLTP/SLTA dalam 1 kelas	30 – 40
		Jumlah guru yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi (%)	95
		Angka Rata-rata Lulusan Ujian Nasional : - SD (%) - SLTP (%) - SLTA (%)	100 95 94
	2.1.2. Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan	Angka partisipasi sekolah (murni siswa berasal dari Kota Blitar) - SD (%) - SLTP (%) - SLTA (%)	100 99,5 90
		Angka putus sekolah (murni siswa berasal dari Kota Blitar) - SD (%) - SLTP (%) - SLTA (%)	0 0,05 5

	2.1.3. Meningkatnya penerapan kurikulum pendidikan karakter dan budi pekerti	Jumlah kurikulum mulok	2
2.2. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	2.2.1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	10,5
		Rata - rata Nilai Ujian Nasional untuk : - SD - SLTP - SLTA	7,90 7,70 7,80
		Jumlah lembaga kursus yang memiliki ijin operasional (%)	100
		Angka melek huruf (%)	99,5

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Yang Adil dan Merata

Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran	Target
3.1. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan	3.1.1 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien (%)	80
		Penambahan poli jiwa, indra, dan kesehatan olahraga di puskesmas / rumahsakit	3
		Tingkat cakupan Peserta KB aktif (%)	78
		Target dan Pencapaian Metode Kontrasepsi Efektif (%)	90
		Jumlah Rumah tangga miskin yang terlayani jaminan kesehatan (%)	100
		Jumlah cakupan Jaminan Kesehatan bagi warga rawan miskin (%)	80
3.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	3.2.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah posyandu Balita dibanding jumlah RW	1 : 1
		Jumlah posyandu lansia dibanding Kelurahan	1 : 1
		Angka Kematian : - Bayi - Balita - Ibu Melahirkan	0 0 0
		Penanganan Angka Kesakitan : (%) - HIV/AIDS - Demam Berdarah Dengue - Diare	100 100 100
		Peningkatan status gizi : - Kunjungan Neonatus (%) - Kunjungan Bayi (%) - Bayi Garis Merah (%) - Balita Gizi Buruk (%)	100 95 1 0
		Tingkat Perubahan tantanan Perilaku hidup bersih dan sehat (%)	70
		Jumlah Rumah tangga yang dipantau dan ber PHBS (%)	75

Misi 4 : Memantapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
4.1. Meningkatkan Kualitas Sistem Perekonomian Kerakyatan	4.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Perekonomian Masyarakat	Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	95
		Panjang jalan yang diterangi PJU dengan panjang jalan keseluruhan (%)	60
		Rasio saluran irigasi tersier (Panjang saluran irigasi tersier terpasang/total panjang saluran tersier)	0,75
		Rasio jaringan irigasi (Rasio luas lahan irigasi teknis / luas lahan irigasi)	0,75
		Prosentase Penduduk yang terlayani air bersih (PDAM)	35
		Jumlah sarana informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat (hotspot)	25
		Jumlah objek wisata	9
		Jumlah kunjungan wisata	875.000
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	7
	4.1.2. Meningkatnya Usaha Ekonomi Kerakyatan	Prosentase sektor tersier dalam PDRB	75
		PDRB per Kapita (ADHB)	13.252.000
		Prosentase koperasi Aktif	75
		Kenaikan Jumlah Usaha Sektor Formal dan Non formal (%)	5
4.2. Memantapkan Penanggulangan Kemiskinan yang komprehesif secara terpadu dan partisipatif	4.2.1. Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Rumah Tangga Miskin	5
		Penurunan Persentase rumah tidak layak huni	100
		Peningkatan Pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan (%)	25
		Penurunan jumlah PMKS (%)	50
		Peningkatan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (%)	25

Misi 5 : Memantapkan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Partisipatif berdasar Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
5.1. Meningkatkan Pembangunan yang Partisipatif	5.1.1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Patisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	75
		Jumlah lembaga sosial kemasya - rakatan yang berperan dalam pembangunan (%)	75
		Tingkat partisipasi politik (%)	75
		Tingkat kesetaran gender dalam forum Musrenbang (%)	30
		Prosentase partisipasi perempuan dalam lembaga formal (%)	45
5.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	5.2.1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Lembaga pelayanan publik yang menghitung Indeks kepuasan masyarakat dan bernilai baik (%)	100
		Jumlah SKPD yang menerapkan sistem AKIP dengan predikat baik (%)	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		Lembaga pelayanan publik yang menerapkan Citizen Charter atau ISO (%)	80
		Jumlah aparat berijazah diploma ke atas (%)	75
		Jumlah Pejabat struktural aparat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%)	100
		Jumlah pelanggaran aparat pemerintah terhadap peraturan kepegawaian	2
		Prosentase SKPD yang mempunyai jaringan berbasis komputer (LAN / WAN)	100
5.3. Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	5.3.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase volume sampah yang tertangani (%)	75
		Peningkatan rumah tinggal berakses sarana air limbah (%)	25
		Jumlah Pengaduan Pencemaran Lingkungan	0
		Jumlah usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan (%)	100

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Acuan Penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan adalah metode yang secara implementatif dijadikan acuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar Tahun 2015. Dengan demikian penentuan strategi harus didasarkan pada berbagai pertimbangan baik rencana pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, rencana pembangunan jangka panjang daerah maupun kondisi terakhir daerah dan tantangan yang akan dihadapi daerah lima tahun ke depan. Adapun acuan-acuan yang digunakan dalam penetapan strategi pembangunan di Kota Blitar adalah

6.1.1. RPJM Nasional 2009 -2014

- a. Visi : terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.
- b. Misi
 - 1) Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
 - 2) Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
 - 3) Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
- c. Agenda Pembangunan
 - 1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
 - 3) Penegakan Pilar Demokrasi
 - 4) Penegakan Hukum
 - 5) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

d. Prioritas Pembangunan Nasional

- 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola;
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Ketahanan Pangan
- 6) Infrastruktur
- 7) Iklim Investasi dan Usaha
- 8) Energi
- 9) Lingkungan Hidup dan bencana
- 10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik;
- 11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

6.1.2. RPJM Daerah Propinsi Jawa Timur 2009-2014.

- a. Visi : Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Misi : Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
- c. Tujuan pembangunan harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar --terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja-- yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
- d. Strategi Pembangunan :
 - (1) Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.

- (2) Keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- (3) Pengarusutamaan gender.
- (4) Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

c. Agenda Pembangunan

- (1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.
- (2) Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama *wong cilik*, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.
- (3) Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan.
- (4) Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
- (5) Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.
- (6) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
- (7) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga.
- (8) Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.

- (9) Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

d. Prioritas Pembangunan

- (1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
- (2) Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- (3) Perluasan Lapangan Kerja
- (4) Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan
- (5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat
- (6) Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis
- (7) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- (8) Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata
- (9) Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur,
- (10) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
- (11) Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang
- (12) Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik,
- (13) Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial
- (14) Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kestaraan Gender,
- (15) Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga
- (16) Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (17) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas
- (18) Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo

6.1.3. RPJPD Kota Blitar 2005 - 2025

- a. Visi : Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan hidup.
- b. Misi
 - (1) Memperkuat predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah
 - (2) Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan perdagangan dan jasa
 - (3) Mewujudkan *good governance*
 - (4) Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, dan nyaman,
- c. Strategi
 - (1) Pengendalian pertumbuhan penduduk
 - (2) Penanggulangan kemiskinan
 - (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - (4) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

6.2. Strategi Pembangunan

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, ditetapkan 3 (tiga) Strategi Pembangunan yang melandasi pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya disebut **TRISAKTI PEMBANGUNAN** :

Pertama, Penerapan "APBD Pro-Rakyat" secara konsisten dan berlanjut terutama untuk sektor-sektor yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kedua, Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar serta peningkatan kesejahteraan sosial dalam koridor penanggulangan kemiskinan secara komprehensif, realistis dan terukur.

Ketiga, Pengembangan Kota Blitar kedepan berlandaskan latar belakang sosio kultural daerah sebagai Kota Nasionalis-Religius dengan prinsip-prinsip otonomi daerah secara partisipatif, konsisten dan berlanjut.

6.3. Pentahapan Pembangunan

Dalam rangka pencapaian visi secara terstruktur dan terukur maka perlu dirumuskan Pentahapan Pembangunan Tahunan untuk memberikan arah, garis, haluan kegiatan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pentahapan pembangunan bukan menunjukkan pengarusutamaan sebuah program pembangunan, namun sebagai upaya mensinergikan, memadukan, mengintegrasikan antara potensi sumberdaya yang ada dengan capaian yang ingin dicapai. Program pembangunan tidak mungkin dilaksanakan dalam porsi yang sama dan berimbang akan tetapi lebih mengarah kepada proporsionalitas. Demikian pula pentahapan tahunan diarahkan kepada konsistensi komitmen visi dan misi yang telah ditetapkan, dan tidak berbanding lurus dengan pendanaan program pembangunan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tahun 2011 (Pertama) :

Tahun pertama merupakan momentum kesinambungan dari periode RPJMD sebelumnya dengan RPJMD 2011-2015 terutama upaya penuntasan rencana program pembangunan sebelumnya. Prioritas dalam tahun pertama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia termasuk penyiapan aparat di tingkat kelurahan, sarana dan prasarana

penunjang, serta upaya pengembangannya, agar tercipta kondisi yang menunjang untuk melaksanakan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya melalui program-program pro rakyat yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, sehingga tahapan ini berfungsi sebagai penguatan dan pemantapan struktur dan pola untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Tahun 2012 (Kedua)

Program pembangunan pada tahun kedua sebagai upaya peningkatan capaian tahun sebelumnya. Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan kepada upaya pencapaian kinerja perekonomian yang berbasis kepada kerakyatan. Struktur perekonomian daerah yang kuat dengan pertumbuhan yang berkualitas merupakan dasar bagi kekuatan pelaksanaan program-program pembangunan lainnya.

Tahun 2013 (ketiga)

Merupakan periode penajaman prioritas pembangunan, dan pada tahun ketiga ini merupakan sebuah titik strategis atas capaian dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sehingga dimungkinkan untuk dilakukan refleksi atas RPJMD baik karena faktor-faktor eksternal maupun internal Pemerintah Kota Blitar. Pengentasan kemiskinan memerlukan penekanan yang lebih pada tahap ini, karena dengan tertatanya struktur perekonomian daerah serta kesiapan semua pihak lebih memudahkan untuk melakukan gerak pengentasan kemiskinan secara komprehensif yang terpadu dan partisipatif.

Tahun ke 2014 (keempat)

Periode ini berperan sebagai evaluasi sekaligus pengambilan langkah-langkah atas capaian yang telah diperoleh terhadap keseluruhan capaian

yang telah ditentukan melalui pengendalian atas program pembangunan yang memiliki capaian lebih, serta menggenjot program pembangunan yang capaiannya masih kurang dari yang diharapkan.

Tahun 2015 (kelima)

Periode ini merupakan tahap akhir dari pencapaian seluruh rencana pembangunan jangka menengah, sehingga pada tahun ini dilakukan penuntasan program-program yang mengarah pada pencapaian visi misi. Dengan demikian visi Kota Blitar Tahun 2015 diharapkan dapat tercapai, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan yang mengarah pada pencapaian visi misi dari RPJP Kota Blitar Tahun 2005-2025.

6.4. Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan strategi dasar pembangunan tersebut agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran pembangunan, maka arah kebijakan masing-masing sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Semangat Nasionalisme, Pelestarian dan Pengembangan Nilai Sejarah, Budaya dan Kearifan Lokal dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan.
 - Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal
2. Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
 - Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan
3. Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Norma Sosial dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan pembinaan terhadap kesadaran hukum

- Peningkatan kualitas lingkungan sosial yang kondusif
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan kualitas sarana prasarana dan tata kelola pendidikan
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 5. Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA (Wajib Belajar 12 tahun)
 6. Meningkatnya penerapan kurikulum pendidikan karakter dan budi pekerti dengan arah kebijakan :
 - Penerapan kurikulum lokal yang bermuatan budi pekerti dan nilai-nilai keagamaan secara sistematis dan terpadu
 7. Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta daya saing lulusan
 - Peningkatan mutu lulusan pendidikan ketrampilan serta upaya pengentasan buta aksara
 8. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dengan arah kebijakan :
 - peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan
 - Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan
 9. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan
 - Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
 10. Meningkatnya Infrastruktur Perekonomian Masyarakat dengan arah kebijakan :

- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa daerah.
11. Meningkatnya Usaha Ekonomi Kerakyatan dengan arah kebijakan :
- pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat
 - Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal
12. Berkurangnya Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan arah kebijakan :
- Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan melalui Optimalisasi Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK)
 - Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin
 - Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
13. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan arah kebijakan :
- Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
 - Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
 - Mengembangkan sinergi peran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pembangunan
14. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan arah kebijakan :
- Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
 - Peningkatan infrastruktur pelayanan publik utamanya di tingkat kelurahan dan kecamatan

15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan arah kebijakan:

- Peningkatan manajemen pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran dan pembangunan yang partisipatif
- Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup
- Peningkatan konservasi lingkungan hidup

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi.

Agar visi Kota Blitar Tahun 2015 dapat terwujud, kebijakan umum pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui Perwujudkan suatu tatanan sosial masyarakat sesuai sosio kultural daerah sebagai Kota Nasionalis-Religius, yaitu suatu nasionalisme yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kondisi ini tercermin dengan semakin kondusifnya lingkungan sosial bagi kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa serta tetap lestari dan berkembangnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berujung pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter kebangsaan yang kuat.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui Wajib Pendidikan Dasar 12 Tahun dan fasilitasi bagi warga kurang mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan meningkatkan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan merata melalui pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan serta peningkatan peran masyarakat melalui lembaga kesehatan yang saat ini sudah ada ditengah-tengah masyarakat seperti Posyandu. Peningkatan keterjangkauan dilakukan dengan meningkatkan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan lansia. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
4. Memantapkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberdayakan potensi Koperasi dan UKM serta sektor informal agar dapat berkembang dengan baik sehingga peran dan sumbangannya dalam pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi, serta kesempatan untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lebih merata dan berkeadilan. Pariwisata dikembangkan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kota Blitar, selain potensi-potensi unggulan lainnya. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan komprehensif, terpadu dan partisipatif dengan meningkatkan kemandirian masyarakat miskin melalui berbagai aspek tidak saja ekonomi tapi juga pendidikan dan kesehatan serta aspek lainnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik

program maupun pelakunya serta melibatkan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat miskin sendiri.

5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, adalah dengan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan pembangunan, penguatan elemen masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Untuk mendorong percepatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan utamanya masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu dilakukan dukungan anggaran sebesar Rp. 1 (satu) Milyard Rupiah untuk masing-masing kelurahan. Proses ini dilakukan secara bertahap sampai Tahun 2015.

7.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan serta dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi makro Kota Blitar, pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan diarahkan untuk (1) Mendukung terwujudnya sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015, (2) Menjamin kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Blitar secara terpadu dan sinergis, (3) Menjamin kontinuitas pelaksanaan program pembangunan daerah khususnya program dan kegiatan pembangunan strategis yang menjadi fundamen pembangunan perekonomian daerah baik secara makro maupun mikro.

Kebijakan Umum pengelolaan keuangan secara garis besar meliputi kebijakan umum bidang pendapatan, kebijakan umum bidang belanja dan kebijakan umum bidang pembiayaan, yaitu :

7.2.1. Pendapatan Daerah

Dalam menetapkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanyalah salah satu unsur dan sama sekali bukanlah satu-satunya unsur pendapatan daerah. Walaupun demikian PAD dapat dipergunakan sebagai indikator paling dominan dari tingkat keseimbangan neraca anggaran suatu daerah.
5. Pengertian pendapatan daerah sebagaimana diutarakan pada angka 1 sampai dengan 4 diatas semata-mata dipergunakan untuk dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sementara disisi yang lain yakni dalam koridor strategi pengembangan perekonomian Kota Blitar selama ini dikenal pengertian Pendapatan Daerah yang maknanya sama sekali berbeda dengan yang diutarakan pada angka 1 sampai dengan 4 di atas.

Dalam koridor strategi pengembangan perekonomian Kota Blitar, selama ini dikenal sebuah strategi yang dinamakan sebagai “Pendapatan Terbuka” yaitu sebuah upaya untuk menggabungkan pendapatan pemerintah dan masyarakat melalui proses sinergitas kegiatan antar sektor sehingga menimbulkan sebuah proses *multiplier effect* secara terus menerus dan berlanjut yang pada ujungnya menghasilkan “pendapatan” berupa segala bentuk investasi baik yang berupa uang tunai maupun barang yang beredar dalam kegiatan perekonomian riil di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Blitar Tahun 2015, maka perlu dirumuskan kebijakan umum peningkatan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan strategi pencapaian target pendapatan daerah.

a. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Blitar diarahkan agar pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka diversifikasi, efisiensi dan efektifitas penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang diperoleh melalui berbagai upaya baik dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah maupun usaha – usaha lain yang sah. Melalui langkah intensifikasi yang dilakukan secara kreatif dan inovatif, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, dan sedapat mungkin mengurangi beban masyarakat.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sehingga besarnya akan sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat serta program-program inovatif yang bisa *ditawarkan* kepada pemerintah.

b. Target Pendapatan Daerah

Didasarkan atas analisa kondisi ekonomi makro baik global, nasional, regional maupun lokal sebagaimana uraian terdahulu serta dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki daerah, maka pendapatan daerah Kota Blitar pada tahun 2015 diproyeksikan akan berada pada angka Rp. 459.531.444.846,53 (tabel 3.3).

c. Strategi Pencapaian Target

Strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mencapai target peningkatan pendapatan daerah tidak hanya terfokus kepada kegiatan yang secara langsung terkait dengan upaya peningkatan pendapatan tetapi mencakup berbagai langkah yang secara

tidak langsung seperti peningkatan layanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah. Secara lebih rinci strategi dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Strategi Bidang Pendapatan

- Memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada unit-unit penghasil dalam mengelola anggarannya sesuai dengan kapasitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah.
- Peningkatan hubungan kerja/kerjasama antar dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi serta dengan instansi vertikal dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah.
- Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan kabupaten/kota di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Optimalisasi pemanfaatan asset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi.

2. Strategi Bidang Pelayanan Publik.

- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.

- Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware/software) sebagai pendukung utama kelembagaan.
- Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

3. Strategi Bidang Kelembagaan

- Penyederhanaan peraturan perundang-undangan.
- Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparansi dan bertanggung jawab.
- Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- In House/On Job Training.
- Program rekrutmen sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi.
- Optimalisasi UPTD.

7.2.2. Pembelanjaan Daerah

a. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum bidang belanja diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta pengawasan penggunaan anggaran. Dalam implementasinya, penggunaan anggaran belanja akan diprioritaskan untuk :

(1) Mencukupi belanja wajib terutama untuk mengantisipasi tambahan belanja gaji pegawai akibat adanya penambahan jumlah personil Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat, kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan umum pegawai (seperti pemberian uang makan) serta beberapa kebutuhan untuk mendukung program-program strategis daerah, (2) Mewujudkan sasaran dan

prioritas pembangunan jangka menengah Kota Blitar Tahun 2011-2015, (3) Merespon tuntutan kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang di tengah masyarakat setelah selesainya proses penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, (4) Mendukung kontinuitas pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang sejak semula ditetapkan sebagai program *multiyears*.

b. Strategi Pengelolaan Belanja Daerah

Strategi pengendalian belanja daerah Kota Blitar tahun 2011 sampai 2015 dititikberatkan kepada langkah-langkah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Blitar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai Permendagri 59 Tahun 2007 dengan tetap melakukan sinkronisasi dengan program/kegiatan di RPJMD Kota Blitar.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (*performance budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian.

Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Kota Blitar dalam rangka implementasi kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi pengalokasian belanja tidak langsung pegawai (gaji) serta secara selektif dengan berpedoman pada prinsip efisiensi memenuhi

- belanja langsung seperti belanja rutin (efisiensi pemanfaatan listrik, air, telepon, rehab ringan gedung kantor, efisiensi perjalanan dinas).
2. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan memperketat fungsi pengawasan.
 3. Prioritas pemenuhan belanja kegiatan-kegiatan yang bersifat *multiyears* sesuai dengan kemampuan dan percepatan penyelesaian pekerjaan.
 4. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah dan fasilitasi bantuan keuangan/bantuan sosial untuk program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

7.2.3. Kebijakan Umum Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dilakukan dengan secara terus menerus melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang realistis dan sedapat mungkin menghindari penerimaan pembiayaan yang berdasarkan sumbernya diperkirakan akan dapat membebani anggaran tahun-tahun selanjutnya.

Arah kebijakan dalam bidang penerimaan pembiayaan ini diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pembiayaan daerah agar dapat berjalan lebih akurat, efisien, efektif, transparan dan realistis melalui langkah-langkah pengelolaan pembiayaan sebagai berikut :

1. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk Giro, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Selain itu diperlukan juga pembentukan dana cadangan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Besarnya dana cadangan yang harus disediakan dalam satu tahun anggaran tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun perencanaan.

7.3. Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah pembangunan daerah, program-program pembangunan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kerangka waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- (1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (2) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (3) Pendidikan Politik Masyarakat

b. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal, melalui program :

- 1) Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 2) Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 3) Pengembangan Nilai Budaya
- 4) Pengelolaan Keragaman Budaya

c. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, melalui program:

- 1) Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
- 2) Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Agama

d. Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan, melalui program :

- 1) Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Tempat Ibadah

e. Peningkatan Pembinaan terhadap kesadaran hukum, melalui program :

- 1) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

f. Peningkatan kualitas lingkungan sosial yang kondusif, melalui program :

- 1) Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 3) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- 4) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

g. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan tata kelola pendidikan, melalui program :

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- 3) Pendidikan Menengah
- 4) Manajemen Pelayanan Pendidikan

h. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, melalui program :

- 1) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

i. Peningkatan aksesibilitas pendidikan masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan jalur pendidikan sampai setingkat SLTA (wajib belajar 12 tahun), melalui program :

1) Bantuan Pendidikan

j. Penerapan kurikulum lokal yang bermuatan budi pekerti dan nilai-nilai keagamaan secara sistematis dan terpadu, melalui program :

2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal

k. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta daya saing lulusan, melalui program :

1) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

2) Pendidikan Menengah

3) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

l. Peningkatan mutu lulusan pendidikan ketrampilan serta upaya pengentasan buta aksara, melalui program :

1) Pendidikan Non Formal

2) Pendidikan Luar Biasa

m. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan, melalui program :

1) Obat dan Perbekalan Kesehatan

2) Upaya Kesehatan Masyarakat

3) Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- 4) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- 5) Sumberdaya Kesehatan
- 6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 7) Pengembangan Obat Asli Indonesia
- 8) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 9) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 10) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 11) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- 13) Pelayanan Kontrasepsi
- 14) Keluarga Berencana
- 15) Kesehatan Reproduksi Remaja
- 16) Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- 17) Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
- 18) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 19) Pengawasan Obat dan Makanan
- 20) Perbaikan Gizi Masyarakat

n. Peningkatan keterjangkauan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dengan optimalisasi dan pengembangan sistem jaminan kesehatan, melalui program :

- 1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 2) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 3) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

o. Peningkatan peran kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan, melalui program :

- 1) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Perbaikan Gizi Masyarakat

p. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, melalui program :

- 1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

q. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian terutama yang mendukung pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa daerah, melalui program :

- 1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Pengembangan Destinasi Wisata
- 3) Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- 4) Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 5) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- 6) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 8) Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

- 9) Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
- 10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lanilla
- 11) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lanilla
- 12) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 13) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 14) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 15) Lingkungan Sehat Perumahan
- 16) Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- 17) Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
- 18) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 19) Pengelolaan Areal Pemakaman
- 20) Perencanaan Tata Ruang
- 21) Pemanfaatan Ruang
- 22) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 23) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 24) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 25) Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 26) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

r. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat, melalui program :

- 1) Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- 2) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 3) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- 4) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 5) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- 6) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 7) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 8) Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 9) Peningkatan Ketahanan Pangan
- 10) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan
- 11) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- 12) Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- 13) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
- 14) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 15) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
- 16) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 17) Peningkatan Kesempatan Kerja
- 18) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

s. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal, melalui program :

- 1) Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
- 2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- 3) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
- 4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 5) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 6) Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

7) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

8) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

t. Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan melalui Optimalisasi Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK), melalui program :

- 1) Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Pembinaan Anak Terlantar
- 4) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

u. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, melalui program :

- 1) Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

v. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, melalui program :

- 1) Pemberdayaan Fakir Miskin dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 2) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 3) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
- 4) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- 5) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- 6) Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma

x. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, melalui program :

- 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
- 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- 3) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 4) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- 5) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- 6) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
- 7) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

y. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, melalui program:

- 1) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- 3) Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
- 4) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

z. Mengembangkan sinergi peran, fungsi dan kerjasama antar stakeholders pembangunan, melalui program :

- 1) Peningkatan dan Pengembangan Stakeholders Pembangunan

aa. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi, melalui program :

- 1) Penataan Administrasi Kependudukan
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 3) Pengembangan Data/Informasi
- 4) Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
- 5) Kerjasama Pembangunan
- 6) Pengembangan Wilayah Perbatasan

- 7) Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 8) Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
- 9) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10) Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 11) Perencanaan Sosial dan Budaya
- 12) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- 13) Penataan Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan, dan Pendaftaran tanah
- 14) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 15) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 16) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 18) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 19) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 20) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan
- 21) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 22) Peningkatan kapasitas Kelembagaan
- 23) Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemerintah
- 24) Pengembangan Perusahaan Daerah
- 25) Peningkatan Penerimaan Daerah
- 26) Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah
- 27) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 28) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 29) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

- 30) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- 31) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- 32) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 33) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- 34) Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- 35) Kerjasama Informasi dengan Media Massa

bb. Peningkatan penerapan sistem manajemen pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup melalui proses pembelajaran dan pembangunan yang partisipatif, melalui program :

- a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- d. Peningkatan Pengendalian Polusi

cc. Pengendalian tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup, melalui program :

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

dd. Peningkatan konservasi lingkungan hidup, melalui program :

Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

7.4. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif masing-masing program pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Prioritas Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun ke depan maka prioritas pembangunan daerah yang hendak diwujudkan meliputi urusan-urusan sebagai berikut :

a. Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Blitar diupayakan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Upaya-upaya yang hendak ditempuh antara lain melalui melalui Wajib Pendidikan Dasar 12 Tahun, serta membuka ruang yang seluas-luasnya bagi para pelajar, mahasiswa, guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kapasitasnya melalui peningkatan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah sehingga diupayakan kapasitas intelektual, emosional maupun spiritual Kota Blitar akan dilandasi dengan keluhuran budi pekerti dan karakter kebangsaan yang kuat.

Peningkatan anggaran pendidikan setidaknya 20 % dari porsi APBD harus konsisten dilakukan secara terus menerus dan dialokasikan untuk perbaikan kualitas guru, pelajar, prasarana dan sarana belajar, sistem serta manajemen pendidikan yang berorientasi global.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kemudahan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan serta peningkatan peran masyarakat melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- Kemudahan pelayanan kesehatan dilakukan dengan memperbanyak secara proporsional pusat layanan kesehatan bagi masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mempermudah birokrasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
- Peningkatan keterjangkauan dilakukan dengan melakukan reformasi sistem jaminan kesehatan masyarakat, mekanisme pembiayaan kesehatan, dan subsidi kesehatan masyarakat.
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas infrastruktur.
- Peningkatan peran masyarakat yaitu dengan mengoptimalkan peran dan fungsi posyandu yang telah ada di tengah-tengah masyarakat.

c. Penanggulangan kemiskinan

Masalah kemiskinan bukan hanya masalah daerah akan tetapi sudah menjadi masalah regional, nasional dan global. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial akan tetapi perlu keterpaduan dan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, daerah dengan dunia usaha serta seluruh komponen masyarakat yang lain. Dengan demikian kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah harus dilaksanakan secara komprehensif baik dari segi pendanaan,

kelembagaan, sistem maupun prosedurnya. Yang tidak kalah pentingnya, perlu data keluarga miskin (gakin) yang akurat dan detail agar program-program yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat diukur capaian targetnya. Data yang dimaksud setidaknya harus *by name, by address, by job*, dan *by character*.

d. Lingkungan hidup

Semakin menurunnya daya dukung lingkungan di Kota Blitar akibat pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kebutuhan perumahan dan permukiman di Kota Blitar ditandai dengan semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (*green space*). Gejala penurunan daya dukung lingkungan terhadap kualitas hidup dan kehidupan masyarakat dapat diindikasikan antara lain dengan makin banyaknya lokasi-lokasi genangan pada saat musim hujan, meningkatnya jumlah dan cakupan penyakit epidemi, serta makin meningkatnya suhu udara di sekitar kita. Dengan demikian prioritas pembangunan dibidang lingkungan diarahkan pada upaya mempertahankan dan meningkatkan kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup (*pro environment budgeting*) dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang berorientasi pada budidaya kawasan serta untuk menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman dan tertata bagi aktifitas sosial ekonomi masyarakat menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat.

e. Pariwisata

Pariwisata sebagai salah satu potensi andalan untuk meningkatkan kinerja perekonomian Kota Blitar perlu dikembangkan lebih lanjut dengan intensifikasi dan diversifikasi obyek pariwisata di Kota Blitar sehingga terjadi sinergitas diantara obyek-obyek wisata. Selain itu perlu juga

dilakukan peningkatan jaringan informasi pariwisata, kerjasama wisata antar daerah, peningkatan kualitas SDM pariwisata serta optimalisasi kinerja biro jasa pariwisata.

8.2. Kebutuhan Pendanaan Program Prioritas

Karena telah ditetapkan menjadi program prioritas, sebagai konsekuensinya maka 5 (lima) program tersebut harus memperoleh perhatian lebih dalam alokasi pendanaannya. Peluang untuk memberikan porsi yang lebih terutama untuk pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan sangat terbuka mengingat kondisi sarana prasarana fisik yang ada di Kota Blitar saat ini relatif dalam kondisi baik dan sangat memadai untuk kebutuhan dalam beberapa tahun mendatang, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan non fisik dapat ditingkatkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena pendidikan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan juga menjadi program prioritas nasional dan propinsi maka kebutuhan anggarannya dapat disinergikan dengan pemerintah pusat dan propinsi, dimana untuk kebutuhan pembangunan fisik dapat diupayakan melalui DAK dan dana dari propinsi, sehingga potensi pendapatan daerah dapat dialokasikan untuk kegiatan non fisik.

Sementara untuk lingkungan hidup, pola pendanaannya yang selama ini telah dilakukan dengan menggandeng lembaga donor dapat lebih diintensifkan lagi. Peluang untuk itu menjadi semakin lebih besar lagi karena adanya kecenderungan dari Negara-negara maju (donor) meningkatkan bantuan melalui pola CSR seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka bahwa sesungguhnya Negara-negara majulah pemberi andil terbesar atas terjadinya kerusakan lingkungan di bumi ini. Karena besarnya bantuan dari

lembaga/negara donor sangat tergantung pada besarnya komitmen daerah dalam mengalokasikan APBD untuk sektor lingkungan hidup, maka APBD Kota Blitar yang dialokasikan untuk lingkungan hidup juga harus ditingkatkan.

Pembangunan pariwisata yang diarahkan pada peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan di Kota Blitar diharapkan dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut tentu saja menuntut konsekuensi dialokasikannya anggaran yang cukup besar pula terutama untuk mengembangkan objek wisata pengunjung. Mengingat potensi pendanaan daerah yang relatif terbatas, maka dalam pengembangan pariwisata Kota Blitar perlu melibatkan peran swasta (investor) selain berupaya menggali potensi pembiayaan lainnya yang bersumber dari dana pusat dan propinsi serta dana lain yang sah.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Agar visi misi tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015 dapat diukur tingkat pencapaiannya maka diperlukan alat ukur yang bisa dijadikan acuan dalam evaluasi pelaksanaan dari rencana lima tahunan ini. Alat ukur sebagaimana dimaksud sesuai PP Nomor 8 Tahun 2008 disebut Indikator Kinerja Daerah.

Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya sangat bergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi awal perencanaan dengan hasil yang ingin dicapai pada masa akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan visi misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015, maka ditetapkan Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut :

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Daerah Kota Blitar

NO	U R A I A N	EXISTING 2009	TARGET CAPAIAN 2015
1.	Indeks Pembangunan Manusia	77,12	80,2
2.	PDRB Perkapita (ADHB)	Rp. 8.653.897,00	Rp.13.252.000,00
3.	Angka Kemiskinan	9,89 %	< 5 %
4.	Angka Melek Huruf	98 %	99,5 %
5.	Angka Lama Sekolah Penduduk diatas 15 tahun	9,4 tahun	10,5 tahun
6.	Usia Harapan Hidup	71,52 tahun	73,29 tahun
7.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6,2	4,66
8.	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 10.000 kelahiran hidup	124,15	73,29

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Program Transisi

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan landasan perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 yang menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, sesuai ketentuan PP 8 Tahun 2008, maka RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih (masa bhakti 2015-2020) selama belum ada RPJMD 2016-2020 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah selama lima tahun ke depan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien, maka diperlukan sinkronisasi dan kesinambungan program pembangunan baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin konsistensi pelaksanaan rencana, mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan antar program serta implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan Pedoman bagi SKPD dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) (SKPD),** dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Blitar Tahun 2011–2015 merupakan penerjemahan visi dan misi serta program walikota dan wakil walikota terpilih sehingga perlu diterjemahkan dalam kegiatan–kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- 2. RPJM Daerah akan Digunakan dalam Penyusunan RKPD,** sebagaimana dijelaskan diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai pedoman untuk penyusunan program–program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan – kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus memiliki keterkaitan dan mendukung pencapaian visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- 3. Penguatan Peran para Stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah**
Sebagaimana disampaikan diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan partisipatif. Melalui pendekatan partisipatif ini diharapkan terjadi proses penguatan stakeholders pembangunan. Stakeholders yang kuat, akan mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program. Dengan demikian, stakeholders yang kuat akan menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mencegah terjadinya penyimpangan.

4. Merupakan dasar evaluasi atas kinerja pemerintahan dan pembangunan lima tahunan maupun tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah menjadi acuan bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

5. Pengendalian, Evaluasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Blitar

Berdasarkan peraturan perundangan yang ada Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan di daerahnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda. Pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi: kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sedangkan Evaluasi Perencanaan Pembangunan meliputi: kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan hasil rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi nasional dan kebijakan nasional lainnya yang terkadang tidak bisa diprediksi sebelumnya yang pengaruhnya bisa sangat kuat terhadap kondisi daerah. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya perubahan terhadap dokumen RPJM Daerah ini. Berdasarkan ketentuan yang ada, Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah jika :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Terjadi perubahan yang mendasar seperti suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional); atau merugikan kepentingan daerah/nasional.
- d. Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.